



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU



PEMERINTAH
KABUPATEN BARRU

KOLABORASI BAZNAS DAN POKJA PKP KABUPATEN BARRU DALAM PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU



PEMERINTAH
KABUPATEN BARRU

KOLABORASI BAZNAS DAN POKJA PKP KABUPATEN BARRU DALAM PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI

**KOLABORASI BAZNAS DAN
POKJA PKP KABUPATEN BARRU
DALAM PENYEDIAAN SARANA
AIR MINUM DAN SANITASI**

Penulis

Ghulanyudi WJ

Narasumber:

Tim BAZNAS Kabupaten Barru

Tim Pokja PKP Kabupaten Barru

Tim Editor:

Hamsah Sinring

Ita Ibnu

Victoria Ngantung

Wahyu Handoyo

Wildan Setiabudi

Buku ini diterbitkan Yayasan BaKTI atas dukungan UNICEF Indonesia

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Singkatan	2
Pengantar	4
BERBAGI PERAN DALAM KOLABORASI PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI	
Pokja PKP Kabupaten Barru	8
BAZNAS Kabupaten Barru	13
Tahapan Kerja Sama BAZNAS dan Pokja PKP	19
Penyediaan Data oleh Pokja PKP	19
Menawarkan Data kepada BAZNAS	26
Tentang Kerja Sama BAZNAS dan Pokja PKP, Serta Keberhasilannya	32
TATA LAKSANA KOLABORASI PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI	
Perjanjian Kerja Sama BAZNAS dan Pokja	40
Gandeng BAZNAS Capai Target Air Minum dan Sanitasi Tuntas	49
Cerita dari Lapangan	53
Suara Gembira Warga Penerima	60

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	OPD	Organisasi Perangkat Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	POKJA	Kelompok Kerja
ASN	Aparatur Sipil Negara	POKJA AMPL	Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan
BABS	Buang Air Besar Sembarangan	POKJA PKP	Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	POKJA PPAS	Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	PKS	Perjanjian Kerja Sama
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional	PSU	Prasarana, Sarana dan Utilitas
CTPS	Cuci Tangan Pakai Sabun	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
DPKP	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SNI	Standar Nasional Indonesia
DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SPAL	Sistem Pengolahan Air Limbah
KKS	Kabupaten Kota Sehat	SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
KPRI	Koperasi Pegawai Republik Indonesia	STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
LLTT	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	UNICEF	United Nation Children's Fund
MUI	Majelis Ulama Indonesia	UPTD PALD	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik
ODF	<i>Open Defecation Free</i>	ZIS	Zakat Infak Sedekah



Foto: Bantuan Sarana Jamban dari BAZNAS dan Pokja PKP.

PENGANTAR

Pemanfaatan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia, belum banyak terjadi. Dalam catatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, sebagaimana termuat dalam buku *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman* (BAZNAS Pusat, 2020), baru terdapat 17 BAZNAS di 17 kabupaten/ kota yang mendukung pembangunan air minum dan sanitasi. Jumlah ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan keberadaan 34 BAZNAS di tingkat provinsi dan 463 BAZNAS kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Mengapa BAZNAS di daerah belum banyak mendukung pembangunan air minum dan sanitasi atau menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan atau Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)?

Faktor penyebabnya beragam. Beberapa faktor diungkapkan perwakilan BAZNAS

dan Pokja PKP kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dalam *Lokakarya Pengembangan Sinergitas Kerja sama Pokja PPAS dan BAZNAS untuk Mendukung Peningkatan Akses Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Aman di Provinsi Sulawesi Selatan*. Dalam kegiatan yang dilaksanakan Yayasan BaKTI atas dukungan UNICEF, bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi dan Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan, 30 November 2021 lalu.

Terungkap beberapa faktor penyebab. Baik menurut pendapat BAZNAS atau Pokja PKP. Menurut Pokja PKP, mereka tidak tahu peran yang dapat dijalankan BAZNAS dalam program dan kegiatan Pokja PKP. Selain itu, Pokja juga tidak tahu bagaimana cara melibatkan BAZNAS, dengan memasukkannya menjadi anggota Pokja PKP.

Di sisi lain, perwakilan BAZNAS menyampaikan, di antara BAZNAS dan Pokja PKP belum ada faktor yang memungkinkan untuk peluang kerja sama. Hal itu disampaikan dengan istilah, BAZNAS dan Pokja PKP telah sama-sama bekerja dengan tujuan sama, namun belum

bekerja sama. Di Kabupaten Enrekang, misalnya, BAZNAS telah mendukung pembangunan sarana air minum dan sanitasi dari program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun dukungan itu belum dilakukan melalui mekanisme kolaborasi yang formal dan optimal serta berkelanjutan.

Hal senada diungkapkan BAZNAS Kota Palopo. Pihaknya selama ini sudah melayani 8 (delapan) asnaf (golongan penerima zakat) yang mayoritas tidak memiliki akses air dan sanitasi. Hal itu secara otomatis BAZNAS Kota Palopo telah mendukung program air minum dan sanitasi, meskipun tidak bekerja sama langsung dengan pemerintah kota. BAZNAS juga mengutarakan, faktor penyebab lainnya adalah ketiadaan data calon penerima bantuan yang dibutuhkan. Disampaikan, data terkait calon penerima seharusnya ada di pemerintah daerah. Namun faktanya, data itu tidak mudah didapatkan.

Menyimak faktor-faktor yang disebutkan, ada benang merah yang menghubungkan pokok persoalan. Faktor itu adalah belum terjalannya komunikasi. BAZNAS maupun Pokja PKP belum membuka diri untuk menjalin relasi. Keduanya belum saling

memahami peran dan kerja masing-masing serta potensi yang bisa dikerjasamakan. Sampai di sini, kita jadi kembali teringat pepatah lama, *tak kenal maka tak sayang*. Selain itu, keinginan untuk berinovasi dengan melakukan kolaborasi, sebagaimana diungkapkan dalam lokakarya, masih terhambat pada faktor struktural. Terbatasnya pemahaman terhadap aturan, sebagai landasan kerja sama dan komitmen pada sektor air minum dan sanitasi, juga menjadi faktor lain penyebab belum terjalannya komunikasi dan kolaborasi yang diharapkan.

Padahal dalam pandangan Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan, potensi kerja sama Pokja PKP di provinsi/ kabupaten/ kota dengan BAZNAS cukup besar. Potensi kerja sama itu, selain program penyediaan sarana air minum dan sanitasi, kerja sama antara BAZNAS dengan Pokja PKP juga bisa dalam program pengembangan perumahan, seperti penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kemudian program relokasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta program kawasan permukiman melalui penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.



Foto: Pembangunan jamban kolaborasi Baznas dan Pokja PKP.

Ada lagi program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum, seperti penyediaan Air Siap Minum (Arsinum) dan kawasan permukiman.

Terkait penggunaan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa. Fatwa MUI No. 001/MUNAS IX/MUI/2015 mengatur tentang Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Dalam fatwa tersebut dijelaskan, bahwa pendayagunaan dana ZIS untuk sarana air minum dan sanitasi layak dan aman diperbolehkan, selama kegiatan tersebut menunjang kesejahteraan dan untuk kemaslahatan umum.

BAZNAS Pusat menyambut baik Fatwa MUI tersebut. BAZNAS dalam buku Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman (BAZNAS Pusat, 2020) telah mengatur dan menetapkan tahapan implementasi dana ZIS untuk air minum dan sanitasi. Dalam buku tersebut disebutkan, implementasi terdiri dari 4

tahapan yang terdiri dari tahap persiapan, pembangunan sarana, pengelolaan keuangan dan tahap pasca konstruksi.

Sejalan dengan Fatwa MUI, BAZNAS Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 menjalin kerja sama dengan Pokja AMPL (sebelum berganti nama menjadi Pokja PKP). Kerjasama itu diwujudkan dalam perjanjian kerja sama yang berlaku 5 (lima) tahun. Kerja sama dengan mekanisme formal kedua lembaga ini sangat menarik dan dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan baru. Pasalnya, sebagaimana terungkap dalam lokakarya di akhir tahun 2021, BAZNAS dan Pokja PKP selama ini belum banyak melakukan kerja sama. Jikapun sudah menjalin kerja sama, hal itu dilakukan sektoral dan parsial.

Kerja sama yang dilakukan BAZNAS dan Pokja PKP Kabupaten Barru, menjadi model baru dan contoh relasi dua lembaga di bawah Pemerintah Kabupaten, yang melakukan kolaborasi menyediakan layanan air bersih dan sanitasi. Hal itu baru pertama kali terjadi di Sulawesi Selatan, atau mungkin juga di Indonesia.

Buku ini menyajikan dan mengungkap rahasia dan kisah sukses di balik kerja sama tersebut. Kisah rintisan dan tahapan proses yang dilakukan, akan coba diuraikan dalam buku ini. Harapannya, apa yang telah terjadi di Kabupaten Barru dapat menginspirasi BAZNAS dan Pokja PKP lain di Indonesia, untuk bisa melakukan hal yang sama; berkolaborasi menyediakan layanan air minum dan sanitasi melalui dana zakat.



BAGIAN PERTAMA

BERBAGI PERAN DALAM KOLABORASI PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI

POKJA PKP KABUPATEN BARRU

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Barru, adalah nama baru dari institusi atau lembaga lama yang sebelumnya telah ada. Lembaga sebelumnya bernama Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Pokja AMPL dibentuk di Kabupaten Barru tahun 2014.

Pokja AMPL bertugas menyiapkan rumusan kebijakan, menyusun strategi dan program dalam pembangunan air

minum dan sanitasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan air minum serta menyebarluaskan informasi AMPL.

Pokja AMPL Kabupaten Barru beranggotakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Dalam struktur Pokja AMPL Kabupaten Barru, ketua dijabat oleh kepala Bappeda.



Foto: Penandatanganan MoU antara BAZNAS dan Pokja PKP Kabupaten Barru.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan air minum dan sanitasi, serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat terkait kelembagaan AMPL, pada tahun 2020 Pokja AMPL berganti nama menjadi Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS). Namun nama baru ini tak

berlangsung lama. Pada tahun 2021, Pokja PPAS bersalin nama menjadi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Perubahan ini seiring adanya Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 12/PRT/M/2020, tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menindaklanjuti Permen PUPR itu, nama Pokja di Kabupaten Barru pun berubah menjadi Pokja PKP, yang dibentuk tanggal 1 April 2021. Pembentukan ini berlandaskan Keputusan Bupati Barru Nomor 371/BAPPEDA/IV/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pokja PKP, sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati tersebut, dibentuk untuk menangani lima bidang, di antaranya air minum dan sanitasi. Air minum dan sanitasi meliputi bidang pengembangan air minum dan sanitasi, termasuk pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan dan persampahan.

Sejak bernama Pokja AMPL, ranah kerja Pokja meliputi PPAS hingga PKP, menyeluruh di setiap aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program hingga pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, pada lima tahun awal keberadaannya, khususnya dalam periode tahun 2014 hingga 2019, Pokja AMPL menyiapkan pondasi pembangunan air minum dan sanitasi dengan perencanaan yang

komprehensif. Pada tahap ini Pokja menyusun dokumen perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Pada tahap berikutnya, aksi-aksi pembangunan sanitasi mulai dilaksanakan, berbasis dokumen perencanaan yang telah ada.

Pokja mulai mengimplementasikan dokumen perencanaannya melalui berbagai kegiatan. Pada tahun 2019, Pokja melakukan pendataan AMPL kepada warga di tujuh kecamatan. Pendataan dengan menggunakan aplikasi *m-water* ini menghasilkan data kondisi dan kepemilikan sarana sanitasi dari 9.241 kepala keluarga (KK). Data tersebut lengkap, mulai kondisi sarana beserta dengan nama dan alamat pemiliknya. Kegiatan pendataan pada warga ini dilanjutkan dengan survei kondisi tangki septik, yang dilakukan khusus untuk ASN Pemerintah Kabupaten Barru.

Selain melakukan survei, Pokja PKP juga mengeluarkan kebijakan itu berupa Surat Edaran (SE) Bupati Barru tentang Pembangunan Tangki Septik Sesuai Standar SNI untuk ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru.



Foto: Kegiatan ramah tamah Bupati Barru, Pokja PKP dan pengurus BAZNAS.

Sasaran SE adalah para ASN dengan maksud agar ASN menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu, implementasi SE juga akan lebih mudah dipantau karena wilayah ASN masih dalam lingkup internal Pemerintah Kabupaten Barru. Setelah ASN diwajibkan memiliki sarana sanitasi dengan tangki septik kedap, selanjutnya masyarakat diajak dan dihimbau melakukan hal yang sama.

Himbauan kepada masyarakat dilakukan Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Barru, drg. Hj. Haznah Syam, MARS. Melalui penerbitan Surat Edaran Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat untuk Penggunaan Tangki Septik Sesuai Standar SNI untuk seluruh masyarakat Kabupaten Barru. Selain sebagai Ketua Forum KKS, Hj Haznah Syam adalah anggota Komisi IX DPR RI.

Kiprah lain yang dilakukan Pokja adalah pelaksanaan pembangunan kepada penerima manfaat. Untuk pelaksanaan pembangunan ini dilakukan melalui tiga skema, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga. Bagi warga mampu, skemanya adalah swadaya warga sendiri dengan mendasarkan pada Surat Edaran Bupati dan Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat. Pembangunan untuk warga dengan kondisi ekonomi menengah ditempuh dengan pembiayaan pinjaman dari koperasi atau *micro finance*.

Sedangkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah skemanya adalah bantuan atau hibah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, BAZNAS dan atau pihak swasta melalui CSR.

Pokja mengembangkan program sanitasi tidak hanya dari aspek teknis dan pendanaan, namun juga aspek pemasaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan permintaan dari masyarakat. Program ini dilakukan melalui pengembangan strategi pemasaran sanitasi serta pembinaan, melalui edukasi dan promosi produk kepada lima pengusaha sanitasi.

Alhasil, kerja-kerja yang dilakukan Pokja untuk perbaikan layanan air minum dan sanitasi tidak ditentukan nama lembaganya. Seluruh kerja dilakukan karena niat dan komitmen memperbaiki kondisi kesehatan warga.

Di sisi lain, Pokja juga mengembangkan program kerja sama atau bermitra dengan pihak lain. Kerja sama yang dijalin di antaranya dengan BAZNAS Kabupaten Barru, bermitra dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dalam penyediaan pendanaan mikro untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Selain itu Pokja juga bekerjasama dengan enam wirausaha sanitasi yang terlatih dan siap untuk penyediaan sarana sanitasi yang aman dan sesuai standar SNI, di seluruh wilayah Kabupaten Barru. Pokja juga bermitra dengan Radio IGA FM, untuk penyebarluasan informasi tentang air minum dan penyehatan lingkungan.

Seperti pepatah, hasil tak menghinai proses. Apa yang dilakukan oleh Pokja PKP Kabupaten Barru serta dukungan Bupati dan Ketua Forum KKS berbuah manis. Pada tahun 2020, Kabupaten Barru berhasil bebas dari perilaku masyarakat

Buang Air Besar Sembarangan atau menjadi Kabupaten ODF (*Open Defecation Free*). Pencapaian hasil itu juga berkat dukungan BAZNAS melalui kerja sama yang dilakukan sejak tahun 2019.

BAZNAS KABUPATEN BARRU

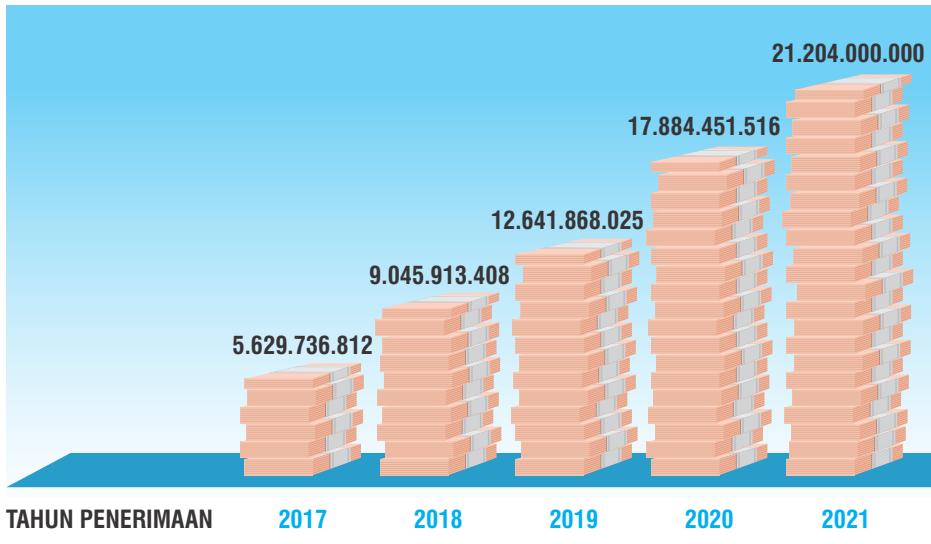
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru No. 478/KESRA/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Barru. Dibentuk dengan visi “Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Bermartabat, dan Profesional”, BAZNAS Kabupaten Barru tumbuh pesat dan menjadi BAZNAS yang dapat menghimpun dana ZIS terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan catatan, dana ZIS yang terhimpun dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tahun 2017, dana umat

yang terhimpun sebesar 5,6 miliar rupiah. Tahun 2018, naik menjadi 9 miliar rupiah. Tahun-tahun berikutnya jumlahnya semakin menanjak. Tahun 2019 terhimpun 12,6 miliar rupiah, lalu 17,8 miliar rupiah di tahun 2020 dan penghimpunan dana ZIS di tahun 2021 mencapai 21,2 miliar rupiah.

Lembaga yang dipimpin *Anre Gurutta* Prof. Dr. H.M. Faried Wadjedy, MA mendasarkan kegiatannya pada lima program, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah dan Ekonomi. Sedangkan program unggulannya meliputi beasiswa miskin (*Polibos SMP 17 Boarding School*), usaha mikro produktif, *Zakat Community Development* (ZCD)/usaha bersama, ZIS penghasil produksi padi dan budi daya air payau/

Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru Periode 2017-2021



deras, pembangunan air minum dan sanitasi serta pusat diklat dan distribusi kambing.

Kesuksesan BAZNAS Kabupaten Barru dalam menghimpun dana dan menjalankan program kegiatannya didasari tiga pilar penyangga. Ketiga pilar itu adalah pemahaman, keteladanan dan kepercayaan. Hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru, Dr. Ir. Abustan, M.Si.

Menurut Sekda, seluruh komisioner BAZNAS sangat memahami substansi BAZNAS baik dari aspek kelembagaan sebagai lembaga amil zakat, maupun peran dan tugasnya. Kondisi ini menyebabkan roda organisasi berjalan baik dan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal, baik dalam penghimpunan dana maupun penyalurannya. Faktor kedua, lanjut Sekda, adalah keteladanan yang ditunjukkan para pimpinan, khususnya



Foto: Komisioner BAZNAS Kabupaten Barru.

Ketua BAZNAS *Anre Gurutta* Prof. Dr. H.M. Faried Wadjedy, MA.

“Beliau memberi teladan, menyampaikan di masjid-masjid tentang zakat malnya. Itu bukan riya’, sebab berzakat semata-mata karena Allah. Tujuannya mengajak semua pihak bersama-sama membersihkan harta dan penghasilannya masing-masing,” ujarnya.

Abustan juga mengakui, dirinya melakukan hal yang sama, semata untuk memotivasi pihak lain, baik ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, maupun di luar ASN. Terlebih sebagai Sekda, Abustan harus memberi contoh jajarannya. Dikatakan, pengumpulan zakat mal (harta), zakat penghasilan/profesi berawal dari ASN. Kegiatan itu sudah di mulai sejak tahun 2016. Ketika



Foto: *Anre Gurutta* Prof. Dr. H.M. Faried Wadjedy, MA
Ketua BAZNAS Kabupaten Barru.

itu di mulai ASN di Polres, Kejaksaan, Guru ASN, dan akhirnya mencakup seluruh ASN yang ada di Kabupaten Barru. Selain untuk membersihkan harta penduduk Kabupaten Barru, pembayaran zakat itu sekaligus membantu warga lain yang masih sangat

kekurangan, utamanya dari golongan asnaf penerima zakat.

Faktor sukses ketiga, sambung Abustan, adalah kepercayaan. Kepercayaan publik kepada para komisioner ini menurutnya tak kalah penting dan utama. Karena itu, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Barru memilih para Komisioner BAZNAS yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka yang dipilih bukanlah pribadi yang masih berpikir bagaimana mengumpulkan banyak uang dan harta.

“Kami memilih yang sudah purna bakti dari pekerjaan sebelumnya. Jika mereka sudah selesai dengan dirinya dan komitmen membantu sesama, maka mereka akan fokus bantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan,” tandas Abustan.

Untuk mendukung kelancaran program kegiatannya, BAZNAS Kabupaten Barru melaksanakan tugasnya dalam lembaga-lembaga yang dibentuknya seperti Layanan Aktif BAZNAS Barru (LAB), BAZNAS Tanggap Bencana Barru (BTB), Lembaga Beasiswa BAZNAS Barru (LBB) dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Barru (LPEM).



“Kami hanya mau bagaimana kita semua yang mampu berzakat membersihkan harta kita. Dari zakat itu kita bantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ini ajaran agama kita,”.

“Tiga Faktor Sukses BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengumpulkan Zakat; Pemahaman, Keteladanan, dan Kepercayaan”.

Dr. Ir. Abustan, M.Si

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru

Tugas mulia yang diemban BAZNAS dilakukan dengan ikhlas dan bagian dari pelaksanaan ibadah. Meski demikian, tentu tak bisa ditolak jika pencapaian kinerja dihargai dan diapresiasi pihak lain. Sebab kerja-kerja ibadah itu dinilai sebagai prestasi. Demikianlah kemudian yang terjadi. BAZNAS Kabupaten Barru dianugerahi sejumlah penghargaan seperti Pelopor Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Direktur BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021. Pada tahun sebelumnya, atau tahun 2020, BAZNAS Kabupaten

Barru mendapat penghargaan Percepatan Penanganan COVID 19 dari BAZNAS Republik Indonesia.

Penghargaan lainnya adalah Akreditasi A (98,68) dengan Kepatuhan Syariah (99,03) dari Audit Syariah tahun 2019/2020. Kemudian Operator SIMBA Terbaik dan Teraktif di Indonesia tahun 2018-2019 oleh Direktur Operasional BAZNAS RI dan pada tahun 2018 mendapatkan BAZNAS Award 2018, kategori Pertumbuhan Penghimpun ZIS 2018 Terbaik Tingkat Nasional.

BAZNAS Kabupaten Barru layak ditiru. Semua aspeknya. Mulai dari kepemimpinan, pencapaian hasil menghimpun dana umat, program kerja serta pendistribusian zakatnya. Pelaksanaan program kerja untuk penyediaan layanan air minum dan

sanitasi, juga dapat dijadikan teladan. BAZNAS membuka diri bekerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini Pokja PKP. Kerja sama ditekankan dalam Perjanjian Kerja Sama dan dilaksanakan bersama. Nilai lebih yang tidak ada duanya.



Foto: Tudangsipulung Bupati, Pokja PKP dan BAZNAS.

TAHAPAN KERJA SAMA BAZNAS DAN POKJA PKP

PENYEDIAAN DATA OLEH POKJA PKP

Dalam konteks perencanaan pembangunan, ketersediaan data menjadi hal penting dan fundamental. Data adalah langkah awal. Data yang valid dan lengkap membantu pemerintah melaksanakan programnya. Data ini juga dapat digunakan pihak lain di luar pemerintah, jika akan berkolaborasi mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Hal itu pula yang disiapkan Pokja PKP (sebelumnya dikenal sebagai Pokja AMPL) Kabupaten Barru sebelum bekerja sama dengan BAZNAS. Data untuk program penyediaan sarana air minum dan sanitasi sangat penting. Data kepemilikan atau kondisi sarana sanitasi yang dimiliki warga di suatu wilayah, akan menjadi dasar intervensi program di wilayah tersebut. Data ini juga dibutuhkan program lainnya, misalnya,

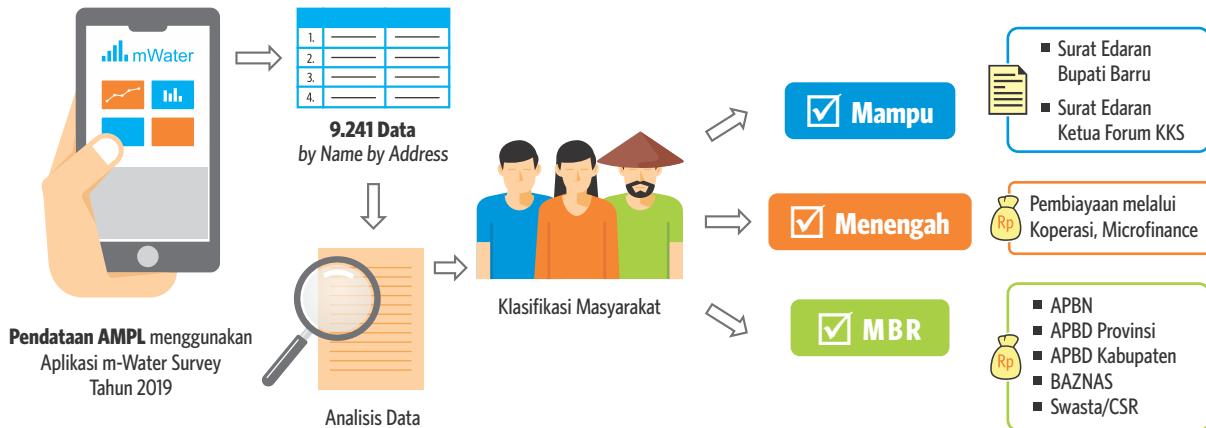
promosi kesehatan. Program akan mudah dilakukan di wilayah yang data kondisi sanitasi warganya telah tercatat.

Dalam kerangka kerja sama dengan BAZNAS, Pokja PKP Kabupaten Barru menyiapkan data dengan melakukan pendataan sarana air minum dan sanitasi warga. Pendataan dilakukan tahun 2019 dan menjangkau masyarakat lima belas kelurahan di tujuh kecamatan.

Tahapan perencanaan dan implementasi pembangunan sarana sanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat dalam bagan (Lihat halaman 20).

Menurut Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kabupaten Barru, Syamsubaird Syarifuddin, pada tahun 2012-2013 Pemerintah Kabupaten Barru pernah melakukan pendataan sarana air minum dan sanitasi. Namun hasil pendataan itu tidak dimutakhirkan atau belum ada tindak lanjut setelah pendataan. Menurut

Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Pokja PKP dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi



Syamsubaird, pendataan tahun 2019 merupakan inisiasi Pokja AMPL berbasis hasil pendataan tahun 2012-2013.

“Di tahun 2019 kita mencari cara baru dalam melakukan pendataan. Cara itu adalah pendataan dengan berbasis aplikasi dan *online*, dengan menggunakan aplikasi *m-water*. Penggunaan aplikasi *m-water* selain melakukan *updating data by name by address*, kami ingin melakukan pendataan yang *outputnya* bisa dalam

bentuk spasial. Sehingga akan memudahkan kita untuk mengetahui titik-titik rumah yang memerlukan bantuan penanganan sarana air minum dan sanitasinya,” jelas Syamsubaird.

Syamsubaird mengatakan, pendataan menggunakan aplikasi *m-water* difasilitasi program IUWASH PLUS. Aplikasi ini tidak berbeda dengan *google form* yakni semacam *tools* yang bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Artinya, poin-poin pertanyaan dalam

form m-water menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan.

Kelebihan *m-water* adalah bisa mengakses atau mendapatkan data responden secara detail. Data rumah responden dilengkapi dengan titik koordinat dan foto yang langsung bisa diinput. Dengan demikian, pendataan menghasilkan data yang valid. Selain itu, *m-water* dapat berintegrasi dengan aplikasi pemetaan, sehingga peta yang dihasilkan adalah peta spasial yang sudah memuat titik-titik koordinatnya. Menurut Syamsubaird, dalam pendampingan IUWASH PLUS ketika itu, aplikasi *m-water* juga diberikan di Kota Makassar.

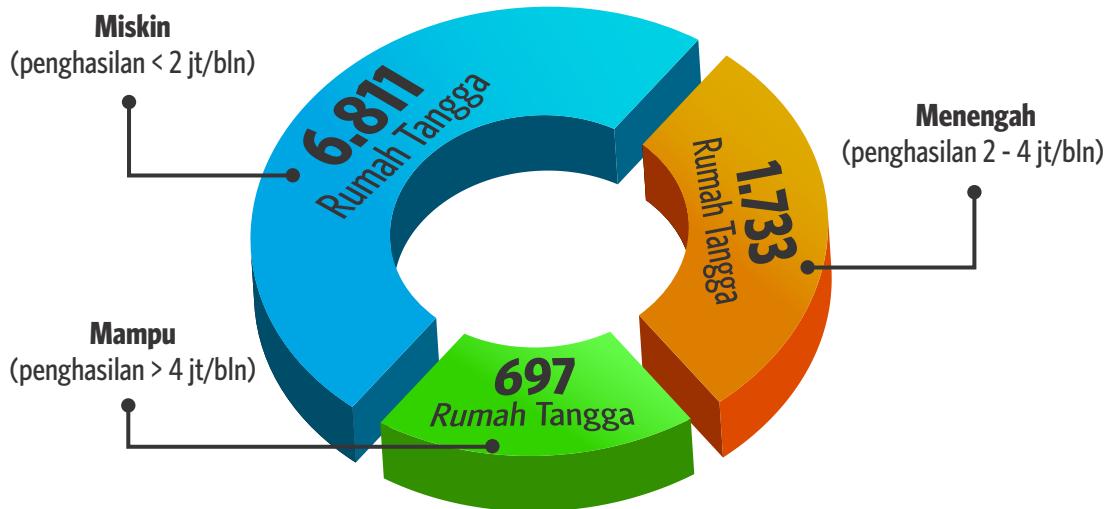
Hal menarik dari pelaksanaan survei dengan aplikasi *m-water* ini, adalah adanya proses *transfer knowledge* antara IUWASH PLUS, Pokja PKP dan Enumerator. Sebelum dilaksanakan survei, IUWASH PLUS memberikan pelatihan kepada Pokja PKP tentang pemahaman kuesioner dan hal-hal lain terkait pelaksanaan survei. Setelah pelatihan selesai, giliran Pokja PKP sehingga terjadi *transfer knowledge* di antara para pihak tersebut.

Dikatakan, pendataan di lima belas kelurahan ini adalah tahap awal, sebelum menjangkau ke empat puluh desa lain di Kabupaten Barru. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Barru terdiri dari tujuh kecamatan, lima belas kelurahan dan empat puluh desa. Pendataan di kelurahan ini sebagai bagian implementasi perencanaan yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan lima belas kelurahan terlebih dulu. Tahun berikutnya akan dikembangkan untuk pendataan di empat puluh desa.

Rencana pendataan ke empat puluh desa pernah dilakukan tahun 2021 lalu, namun menurut Syamsubaird upaya itu dihentikan sementara, terkait akan dilakukannya pendataan terpadu yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barru. Pendataan itu akan dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2022 ini. Pihaknya berharap pendataan terpadu itu terlaksana dan akan mendapatkan data, termasuk di antaranya komponen-komponen yang terkait dengan air minum dan sanitasi.

Untuk pendataan di tahun 2022, Pokja PKP akan membuat percontohan di satu

Hasil Pengklasifikasikan Data menurut Status Ekonomi Warga



kecamatan. Di lokasi percontohan itu akan dilakukan pendataan massif seluruh warga. Kegiatan akan berkolaborasi dengan kecamatan dan pemerintah desa. Adanya wilayah percontohan itu akan memudahkan identifikasi berbagai permasalahan terkait kondisi air minum dan sanitasi warga. Syamsubaird menjelaskan, pendataan yang kemudian dilaksanakan tahun 2019 dilakukan secara umum atau menyasar ke semua masyarakat. Semua warga menjadi responden, baik dari tingkat ekonomi maupun kepemilikan sarana. Warga yang

memiliki sarana ataupun tidak, tetap dijadikan responden. Langkah ini diambil agar nantinya diketahui, siapa warga yang belum atau sudah memiliki sarana air minum dan sanitasi dan bagaimana kondisinya. Dengan demikian maka akan mudah diketahui warga yang akan diprioritaskan untuk ditangani.

“Data yang kami dapat kemudian kami klasifikasikan, karena kondisi di masyarakat Barru itu, ada juga memang masyarakat kami yang berkategori mampu ternyata akses terhadap

sanitasinya atau jambannya itu masih kurang layak, tidak layak atau dia tidak aman. Adanya data ini nanti maka data eksisting yang akan ditangani dan data pencapaian akan mudah dimonitor,” jelas Syamsubaird.

Dikatakan, dari pendataan itu berhasil didapatkan data sebanyak 9.241 nama warga. Data kemudian dianalisa dan dibagi ke dalam tiga klasifikasi masyarakat. Ketiga klasifikasi itu adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau miskin, menengah dan mampu.

Menurut Syamsubaird, pengklasifikasian data berdasarkan kondisi ekonomi itu tidaklah sulit. Tim pengolah data di Sekretariat Pokja AMPL di Bappeda Kabupaten Barru ketika itu dengan mudah bisa melakukannya. Hal itu karena dalam kuesioner terdapat poin-poin pertanyaan terkait dengan penghasilan warga. Klasifikasi ekonomi atau berdasarkan pendapatan perbulan keluarga yang ada di kuesioner, meliputi pendapatan kurang dari 2 juta rupiah perbulan untuk warga miskin. Lalu 2 juta sampai 4 juta rupiah perbulan untuk warga menengah dan pendapatan lebih dari 4 juta per bulan dikategorikan warga mampu.

Pengolahan kemudian terus berlanjut. Setelah diklasifikasi berdasarkan sosial ekonomi, kemudian disusunlah skenario pembiayaannya. Skenario pembiayaan penting untuk menjadi pijakan, sumber pendanaan dari mana yang akan digunakan untuk membangun sarana air minum dan sanitasi yang dibutuhkan itu. Selain itu besarnya dana yang dibutuhkan, juga menjadi data sangat penting untuk memulai proses perbaikan pembangunan sarana air minum dan sanitasi hasil pendataan yang telah dilakukan. Bagaimana kemudian hasil penyusunan skenario pembiayaannya?

Untuk golongan mampu, maka pembangunannya harus dilakukan sendiri. Golongan warga menengah juga harus membangun sarana air minum dan sanitasinya sendiri. Namun pemerintah memberikan solusi dengan mencarikan alternatif pembiayaan dengan cara meminjam/kredit dari koperasi atau perusahaan pembiayaan *micro finance* lainnya. Untuk penanganan warga ekonomi menengah ini, Pemerintah Kabupaten Barru juga menginisiasi kerja sama dengan penyedia jasa untuk pembangunan tangki septik atau kelompok wirausaha sanitasi. Kerja sama

“Kami menyadari betul APBD kami rendah, 900 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 600 miliar rupiah untuk belanja rutin, termasuk gaji pegawai. Sisanya sebesar 300 miliar rupiah untuk pembangunan berbagai sektor. Tentu kami masih kekurangan. Karena itu kami berusaha untuk mendapatkan sumber pendanaan non APBD,”.

Umar, S.KM. M.Kes
Plt. Kepala Bappeda

dengan berbagai pihak ini diupayakan untuk menyasar masyarakat menengah.

Di samping memberikan solusi alternatif pembiayaan, penanganan kepada golongan menengah dan mampu juga dilakukan dengan cara sosialisasi atau memberikan pemahaman terkait jamban layak dan aman. Golongan masyarakat menengah dan mampu ini dipicu untuk membangun atau memperbaiki sarana yang layak dan aman. Hal ini karena pada saat pengolahan data hasil survei, diketahui adanya sarana yang dimiliki oleh

golongan ekonomi menengah dan mampu ini tidak layak. Sosialisasi dan pemicuan dilakukan Pokja PKP melalui Dinas Kesehatan, khususnya oleh para sanitarian.

Sementara untuk warga miskin, pemerintah akan memberikan hibah atau bantuan kepada mereka. Sejumlah OPD yang menjadi anggota Pokja sepakat, penanganan mendesak dan utama adalah membantu pembiayaan untuk memenuhi sarana air minum dan sanitasi warga miskin. Lalu dari mana dana hibahnya?

Berdasarkan alternatif sumber pembiayaan hibah yang disusun, hibah akan diupayakan dari dana pusat melalui APBN, lalu APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Selain itu, upaya hibah dari dana pihak ketiga, seperti perusahaan swasta atau lembaga filantropi, termasuk di dalamnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Pendanaan untuk warga miskin ini akan didorong dari sumber APBN dan APBD Provinsi serta pihak ketiga lainnya. Hal ini karena

APBD Kabupaten Barru tidak mampu membiayai hibah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Umar, S.KM. M.Kes, mengatakan, bahwa penyusunan skenario pembiayaan dari berbagai sumber perlu dilakukan mengingat kondisi APBD Kabupaten Barru yang tidak besar. Oleh karenanya, alternatif sumber pembiayaan perlu didata untuk kemudian dicoba menjadi solusi pembiayaan di luar APBD.



Foto: Bantuan Sarpras Air Minum dari BAZNAS dan Pokja PKP.

MENAWARKAN DATA KEPADA BAZNAS

Setelah hasil pengolahan data selesai dan menghasilkan 6.811 rumah tangga miskin yang menjadi prioritas penanganan, seluruh anggota Pokja sepakat untuk mengupayakan penanganannya atau penyediaan sarananya. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari saling mengomunikasikan kepada OPD terkait, sampai mencari jalan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti ke perusahaan swasta dan BAZNAS.

Prioritas penuntasan warga miskin ini memiliki dua tujuan, yang pertama agar masyarakat miskin di Kabupaten Barru terhindar dari penyakit. Lalu yang kedua agar masyarakat miskin mendapat bantuan pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Tujuan ini selaras dengan visi misi dan program pembangunan Bupati Barru. Melihat keterkaitan visi misi itu, Pokja berinisiatif untuk bertemu dengan BAZNAS. Mengapa BAZNAS?

“Kami menangkap ada peluang untuk memaksimalkan atau mengefektifkan

penganggaran, sehingga Pokja menghubungi BAZNAS agar penanganan sarana air minum dan sanitasi warga miskin ini dapat dibantu,”ungkap Syamsubaird.

Pendekatan kepada BAZNAS dilakukan, karena Pokja mendengar bahwasanya sudah sejak tahun 2017 BAZNAS banyak melakukan program bantuan kepada warga miskin. Program itu adalah bedah rumah. Mendengar informasi program bedah rumah itu, Pokja ingin agar dalam pelaksanaan bedah rumah, sarana air bersih dan sanitasinya diperbaiki atau program itu dilengkapi dengan pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang sesuai standar. Hal itu dilakukan Pokja, sebab berdasarkan informasi yang diperoleh, pembangunan sarana air minum dan sanitasi dalam program bedah rumah masih konvensional atau biasa-biasa saja dan belum sesuai dengan standar kesehatan.

Di samping itu, BAZNAS memiliki visi dan program untuk kemanusiaan, termasuk di dalamnya mendorong masyarakat di Kabupaten Barru menjadi sehat. Hal itu kemudian pokja rumuskan sebagai peluang untuk bekerja sama



“Kami menangkap ada peluang untuk memaksimalkan atau mengefektifkan penganggaran, sehingga Pokja menghubungi BAZNAS agar penanganan sarana air minum dan sanitasi warga miskin ini dapat dibantu”.

Syamsubaird

Kabid Infraswil Bappeda Kabupaten Barru

dengan BAZNAS. Terlebih setelah diketahui bahwa BAZNAS memiliki program khusus untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Meskipun pokja mengaku ketika itu belum memiliki referensi terkait kerja sama pokja dengan BAZNAS. Pokja tetap berkeyakinan peluang kerja sama dengan BAZNAS tak ubahnya kerja sama dengan pihak ketiga lainnya, seperti CSR perusahaan swasta.

Berbekal pemahaman dan keyakinan itulah, pokja lantas mendekati BAZNAS untuk menjalin kerja sama.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Umar, S.KM. M.Kes menambahkan, pendekatan pihaknya ke BAZNAS untuk ikut membantu pembangunan sarana air minum dan sanitasi, disebabkan kiprah BAZNAS sering membantu kepada

masyarakat. Pihaknya juga sudah sering bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Barru pada bidang yang lain, seperti penanganan bencana. Oleh karena itu, pihaknya selama ini selalu bergandengan tangan dengan BAZNAS.

Terkait awal mula keterlibatan BAZNAS dalam pembangunan air minum dan sanitasi, Pokja mengajukan permohonan ke BAZNAS agar dilibatkan dalam program bedah rumah, untuk aspek teknis pembangunan sarana air minum dan sanitasinya. Ide dan tawaran pokja mendapatkan sambutan dari BAZNAS. Komunikasi kemudian sering terjalin dan semakin intens, terutama antara Kabid Infraswil Bappeda, Syamsubaird dengan Wakil Ketua II BAZNAS, Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si.

“Dari hal itulah kami berkomunikasi. Saya tidak tahu berapa lama komunikasinya. Tapi saya intens bertemu dengan Pak Haji karena kami satu hobi, yakni main bulutangkis. Nah, di lapangan kami selesaikan. Kami diskusi banyak ketika di lapangan bulu tangkis, termasuk ide untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama,” kenang Syamsubaird.

Kedua belah pihak akhirnya sepakat menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama. PKS disusun agar kerja sama dapat dilaksanakan secara teratur, sistematis dan berjangka dalam kurun waktu tertentu, sehingga target dan progres dan capaiannya dapat terukur.

Dalam proses penyusunan PKS, Pokja menyusun draft kemudian diserahkan kepada BAZNAS untuk dikoreksi. Proses itu terjadi dalam beberapa kali perbaikan, sampai pada akhirnya tercapai kesepakatan final draf PKS yang siap untuk ditandatangani kedua belah pihak.

Upaya pendekatan kepada BAZNAS pada akhirnya menjadi langkah tepat. Pasalnya, selain visi dan misi yang sama, BAZNAS adalah lembaga yang ‘memiliki uang’, hasil pengumpulan zakat dan sedekah umat. Dana tersebut dalam pemanfaatannya akan disalurkan kepada para asnaf. Asnaf adalah orang-orang atau golongan masyarakat yang berhak menerima zakat. Di antara para asnaf adalah warga miskin, yang memang belum memiliki sarana air minum dan sanitasi yang layak.

Wakil Ketua II BAZNAS, Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si, menyatakan hal yang sama. Bahwa komunikasi antara pihaknya dengan Pokja banyak dilakukan secara informal. Terlebih H. La Minu menganggap Syamsubaird sebagai anak dan keduanya memiliki hobi yang sama, bermain bulutangkis. Kedua faktor itu membuat proses komunikasi dan diskusi menjadi lancar.

Komunikasi dan koordinasi menjadi aspek penting penunjang keberhasilan proses kerja sama antara pokja dan BAZNAS Kabupaten Barru Hal ini selaras dengan yang termuat dalam buku Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman (2020).

Dalam buku yang diterbitkan BAZNAS Pusat itu disebutkan, sinergi dan koordinasi dengan Pokja PPAS/AMPL dalam kegiatan pendayagunaan dana ZIS untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi, sangat dianjurkan bagi BAZNAS provinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Hal itu karena koordinasi antara BAZNAS dengan Pokja PPAS/AMPL diperlukan untuk menginformasikan rencana

dukungan BAZNAS bagi pembangunan sarana air minum dan/ atau sarana sanitasi layak dan aman.

Dalam tahapan ini diharapkan terbangun dukungan baik dari Pokja PPAS/AMPL maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana yang akan dibiayai melalui dana ZIS. Selain mendukung upaya pemerintah untuk mencapai SDG's juga memudahkan melakukan pencatatan untuk input data capaian akses air minum dan sanitasi serta pengelolaan kegiatan.

Selain komunikasi dan koordinasi yang efektif, keberhasilan kerja sama karena munculnya kepercayaan di antara kedua belah pihak. BAZNAS memercayai proses pendataan dan validitas data calon penerima bantuan. Hal itu dikatakan pula oleh La Minu. Menurutnya, pihaknya tertarik diajak kerja sama pokja karena pokja menyerahkan data yang valid. Diakui, BAZNAS tidak memiliki kemampuan melakukan pendataan ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, data warga miskin yang diberikan Pokja memudahkan bagi BAZNAS melaksanakan program yang akan dikerjasamakan.

H. La Minu menambahkan, data yang diberikan Pokja kepada pihaknya valid *by name by address* dan setelah diverifikasi, seluruh datanya sesuai dengan program BAZNAS, yaitu bantuan ditujukan bagi warga yang tergolong mustahik atau kelompok yang berhak menerima zakat.

“Mustahik kalau menggunakan klasifikasi BAZNAS, mereka itu fakir atau miskin dan mereka yang berpenghasilan rendah di bawah dari kebutuhan rata-rata. Itu memang sasaran bantuan program BAZNAS dan data seperti itu tersedia di pokja,” ujar La Minu.

Terkait data untuk penyaluran bantuan dana zakat guna penyediaan sarana air minum dan sanitasi ini, di Kabupaten Barru terdapat dua jenis data. Kedua data itu adalah data yang berasal dari Pokja PKP dan data mustahik yang dimiliki BAZNAS. Data Pokja yang diberikan kepada BAZNAS adalah data final hasil pembahasan dan kesepakatan semua anggota Pokja. Data dari Pokja tersebut disesuaikan dengan data mustahik, jika telah sesuai maka data itulah yang digunakan.

Selain kepercayaan pihaknya pada data yang diberikan pokja, La Minu menyatakan, ketertarikan pihaknya bekerja dengan pokja adalah, sarana sanitasi atau jamban yang akan dibangun sudah sesuai dengan standar nasional. Hal itu menurut La Minu sangat penting, karena itu berarti bantuan yang diberikan BAZNAS akan menghasilkan sarana sanitasi yang berkualitas. Sebab berdasarkan pengalamannya berdiskusi dengan rekan-rekan BAZNAS dari kabupaten/kota yang lain, BAZNAS di sana juga dilibatkan dalam pembangunan sarana sanitasi, namun begitu sarana selesai dibangun, sudah dianggap selesai. Apakah kemudian kualitasnya bagus atau tidak atau sarana digunakan atau tidak, tidak ada verifikasinya.

“Kalau di Barru tidak seperti itu. Kita bersama-sama dengan pokja melakukan verifikasi. Selain itu kita juga meminta Kepala Desa bertanggung jawab pada kualitas dan pemanfaatan sarana. Kalau Kepala Desa tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, program bantuannya kita pindahkan ke desa lain,” tandas La Minu.

Dikatakan, dengan adanya verifikasi dan pihak yang bertanggung jawab di luar penerima bantuan, sarana yang dibangun BAZNAS termanfaatkan dengan baik oleh penerimanya. La Minu meyakini hal itu berdasarkan pengamatannya di tengah masyarakat yang mendapatkan bantuan. Berdasarkan pengamatannya, setelah mendapatkan bantuan sarana sanitasi, dirinya tidak melihat lagi kebiasaan warga BABS.

La Minu menambahkan, bekerja sama dengan pokja dalam program pembangunan sarana air minum dan sanitasi itu memiliki akuntabilitas yang cukup tinggi. Sejak awal mula perencanaan sampai dengan pasca pembangunan, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu nilai akuntabilitas yang cukup tinggi itu, lanjut La Minu, adalah keharusan syarat adanya penanggungjawab di lokasi program. Penanggungjawab itu mulai dari tokoh masyarakat atau kepala desa. Model pelaksanaan program seperti itu menjamin program berjalan sesuai sasaran dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Ada penanggungjawabnya, eh Pak Desa ini ada program di sini 64 jamban mau tidak bertanggung jawab, bahwa ini selesai ada targetnya. Kalau dia tanda tangan itu perjanjian itu, saya dan pokja kasih bantuannya. Dengan demikian itu kita tertarik, BAZNAS tidak terlalu susah lagi, karena program pasti berjalan dan sampai kepada sasaran,” ujar La Minu.

Ditambahkan La Minu, di luar semua itu, pihaknya berkenan terlibat dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi bersama pokja, karena aspek pembangunan air minum dan sanitasi telah menjadi salah satu program unggulan BAZNAS. Oleh karena itulah, penawaran dari Pokja AMPL disambut baik karena hal itu sejalan dengan program unggulan yang telah dicanangkan BAZNAS.

TENTANG KERJA SAMA BAZNAS DAN POKJA PKP, SERTA KEBERHASILANNYA

Kunci keberhasilan Kabupaten Barru menjadi Kabupaten ODF mendapat apresiasi pihak lain. Penghargaan atas kerja dan prestasi Pokja diberikan. Setidaknya ada tiga bentuk apresiasi penting yang diterima. Penghargaan itu berupa Peringkat I Percepatan ODF dari Kementerian Kesehatan tahun 2020. Kemudian 5 Terbaik Nasional STBM Award Kategori SUPPLY tahun 2021 dan Penghargaan Program KKS Swastisaba Wistara Kedua Tahun 2021 dari Kementerian Kesehatan.

Semua Pihak Terlibat dan Berbuat

Sejarah keberhasilan kolaborasi kita dimulai saat Kabupaten Barru dideklarasikan menjadi Kabupaten ODF (*Open Defecation Free*). Kita semua bergerak. Mulai dari pimpinan kita sampai warga di masyarakat. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang juga Ketua Forum Kabupaten Sehat, Ibu drg. Hj. Hasnah Syam, MARS mendorong semua potensi-potensi agar status ODF itu dicapai. Dalam praktik kolaborasi, Pokja memfasilitasi dengan memberikan data penerima manfaat, Dinas Kesehatan memicu dan BAZNAS kemudian membiayai, serta teman-teman di lokasi semuanya bekerja sama.

Sambutan warga juga luar biasa. Mereka mengeluarkan swadaya, karena kami dan BAZNAS tidak boleh membantu 100%. Harus disisakan sebagian, agar ada rasa memilikinya. Rupanya masyarakat itu sanggup untuk meneruskan dan melanjutkan bantuan yang sudah kita berikan. Sehingga status kita langsung berubah menjadi jamban yang aman.

Umar, S.KM. M.Kes

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda

Karena septik tank yang diberikan oleh BAZNAS itu, yang kedap.

Inilah yang mungkin perlu dicatat, bahwa bagaimana praktik baik ini melibatkan berbagai hal, mulai dari fungsi kepemimpinan, fungsi pengorganisasiannya, fungsi masyarakat yang memang mau dan sebagainya. Tapi hal ini juga didukung karena tingkat religiusnya masyarakat Kabupaten Barru itu cukup tinggi, sehingga ketika kita masuki dengan ajakan yang sifatnya merupakan perintah dalam Islam, maka langsung juga ada kemauannya. Inilah yang kami gunakan juga, untuk memicu kemauan masyarakat.



BAZNAS Akan Selalu Berkolaborasi, Kami Tak Bisa Jalan Sendiri

Setelah ada dasar dari MUI Pusat tentang sanitasi dan air bersih, maka Badan Amil Zakat Nasional setiap tahunnya BAZNAS mengeluarkan dana kurang lebih 200 juta rupiah untuk program air minum dan sanitasi, karena hal tersebut masuk dalam syariah. Jadi untuk mendistribusikan dana yang diterima, itu ada dua dasarnya, yaitu pertama Al-Quran dalam Surah At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan bahwa terdapat delapan asnaf. Kedua ialah proyeksi kelima program, yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, advokasi dan ekonomi. Sanitasi dan air bersih inilah yang kemudian masuk dalam program kemanusiaan. Kemudian kemanusiaannya ini, masuk dalam asnaf *fiisabilillah*. Kita memprogramkan sanitasi dan air minum memiliki dasar hukum yang kuat. Karena itu, BAZNAS akan selalu memprogramkan hal tersebut.

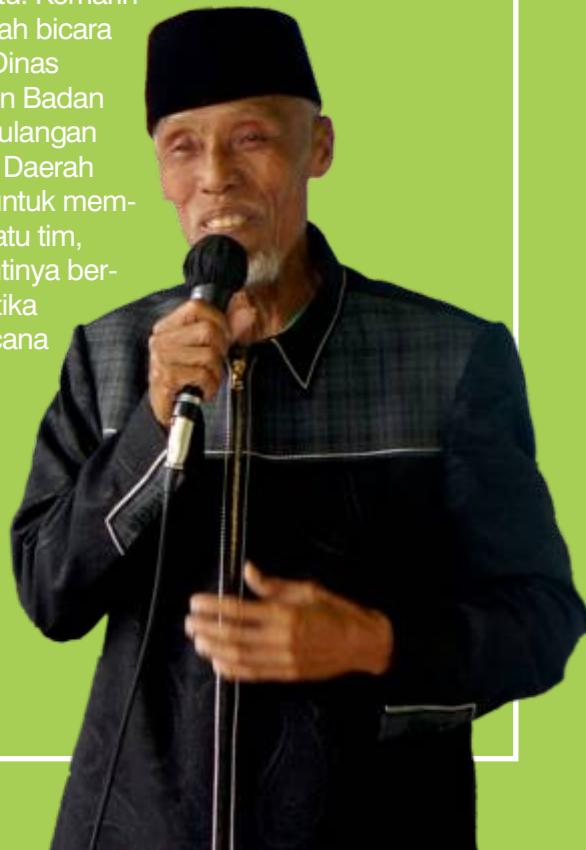
Kenapa kita berhubungan dengan AMPL, karena (Pokja) AMPL ini punya data yang konkrit. Melalui data dapat diketahui sekian yang tidak memiliki akses sanitasi, dan sekian yang dapat menjadi sasaran BAZNAS. Artinya, prosedur bantuan itu

memiliki mekanisme, yang data konkritnya diperoleh dari pihak pemerintah, dan BAZNAS akan verifikasi di lapangan.

Saya sampaikan juga bahwa kita ini organisasi pemerintah yang non struktural. Jadi kita tidak boleh membuat program yang bertentangan dengan program daerah. Sehingga kita harus mendukung atau saling berkolaborasi, karena BAZNAS juga tidak bisa berjalan sendiri. Dan Alhamdulillah kita di BAZNAS, untuk urusan mengeluarkan uang itu tidak susah. Sama halnya dengan apabila terjadi bencana alam, maka BAZNAS juga bisa langsung membantu. Kemarin saya sudah bicara dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membentuk satu tim, yang nantinya berperan ketika ada bencana alam.

H. La Minu Kalibu

Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru



Komitmen adalah Kunci Keberhasilan

Terkait dengan sanitasi dan air bersih, ini merupakan kewenangan Dinas PUPR yang cukup berat. Karena kita tahu bersama, untuk mencapai target 100% itu, ada komitmen yang harus dijalankan. Dari hal tersebut, kita melihat bahwa salah satu poin penting dalam menjalankan program ialah komitmen. Artinya, bagaimana menerjemahkan apa yang menjadi program BAZNAS, karena bisa saja setelah adanya kepengurusan yang baru, mereka menerjemahkan sesuatu yang berbeda, menurut mereka sendiri. Tapi Alhamdulillah, saat ini BAZNAS berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah.

Kolaborasi satu hal yang luar biasa dan sangat sulit diimplementasikan, ini susah. Karena ada yang namanya ego sektoral atau ego masing-masing OPD. Tetapi karena adanya komitmen, maka ego tersebut dapat dihilangkan. Hal inilah yang perlu kita tekankan. Bahwa BAZNAS memiliki potensi besar saat ini, itu juga karena adanya kontribusi pemerintah. Karena tentunya BAZNAS tidak dapat berbuat banyak tanpa

adanya dukungan pemerintah. Dan Alhamdulillah, dari pihak pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendukung BAZNAS, sehingga sampai sekarang BAZNAS terus berkembang dan pendapatannya bisa mencapai 21 Miliar.

Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Karena pemerintah juga berkomitmen bahwa seluruh ASN atau PNS Kabupaten Barru wajib berzakat. Inilah yang namanya komitmen bersama, yang kemudian Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Karena pemerintah



Moh. Fadly R. Pawae, S.IP, M.Si

Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Barru

juga berkomitmen bahwa seluruh ASN atau PNS Kabupaten Barru wajib berzakat. Inilah yang namanya komitmen bersama, yang kemudian memunculkan yang namanya kolaborasi. Sehingga kita tidak hanya berharap dari APBD saja, karena APBD kita sangat terbatas. Makanya, kita mencari segmen-segmen pembiayaan lainnya, untuk menangani sanitasi dan air bersih. Dan Alhamdulillah, BAZNAS ini hadir dan bekerja sama dengan kita.

Di sini Pokja memang menjadi ujung tombak, yang kemudian memberikan kontribusi bahwa kita bisa berkolaborasi untuk menuntaskan masalah sanitasi dan air bersih ini, melalui BAZNAS. Itulah yang menyebabkan BAZNAS di Kabupaten Barru menjadi sangat potensial dan membanggakan. Sehingga kami berharap apabila ada pergantian orang atau komisioner, komitmen itu akan tetap ada. Jadi itulah salah satu contoh baik atau *best practices* di Kabupaten Barru, yaitu komitmen, kolaborasi, dan sadar atau tidak sadar, pihak pemerintah itu perlu untuk membangun segmen pembiayaan yang baru.

Air Minum dan Sanitasi Sudah Menjadi Program Utama di BAZNAS

Di sini, ada beberapa yang hal yang kami garis bawahi. Pertama, berkaitan dengan komitmen. *Insyallah* BAZNAS Kabupaten Barru akan selalu berniat untuk berkomitmen bersama, dalam rangka mensejahterakan dan menyehatkan masyarakat Barru. Karena kami sudah yakin, bahwa sanitasi ini ada di dalam Al-Qur'an, tepatnya di QS Al-Anbiya Ayat 30.

Oleh karena itu, kami semua sepakat bahwa program sanitasi ini adalah program yang sudah menjadi program utama di BAZNAS Kabupaten Barru.



H. Abdullah Rahim

Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Barru

Kedua, ialah menyangkut masalah data. Karena apapun yang kita lakukan harus tetap mengacu pada data. Tapi di Kabupaten Barru ini, kami tidak merasakan kesulitan dalam melakukan pendataan. Karena di 55 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Barru, semuanya sudah memiliki layanan aktif BAZNAS yang terdiri dari para relawan. Sehingga seluruh data fakir dan miskin itu, semuanya ada di tangan relawan. Inilah yang menjadi ciri khas Kabupaten Barru, yakni memiliki relawan.

Ketiga ialah berkolaborasi. BAZNAS ini memiliki 45 program, di antaranya itulah sanitasi. Namun, BAZNAS tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya pihak ketiga yang membantu kami. BAZNAS Kabupaten Barru ini satu-satunya BAZNAS di Indonesia, yang menanggung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Itu ada sekitar 1.723 perlindungan ketenagakerjaan yang kami tangani. Sebanyak 324 masjid mulai dari Imam, Khatib dan Doja atau Marbotnya ditanggung. Ini BAZNAS yang bayarkan. Kenapa kami melakukan perlindungan kepada Imam, Khatib dan Doja ini? Karena kami berpikir bahwa itulah corong BAZNAS yang terdepan di masjid. Kalau dia meninggal, maka BPJS akan memberikan santunan.

Keempat ialah terkait dengan bantuan bencana alam. BAZNAS juga

memprogram untuk tahun ini sekitar 500 juta untuk bantuan bencana alam. Tapi semoga ini tidak dimanfaatkan dan tidak ada bencana yang terjadi. Sehingga bisa kita alihkan ke program lain.

Kelima ialah menyangkut peningkatan ekonomi keluarga. BAZNAS ini juga memberikan bantuan atau santunan kepada 110 fakir dan 5.300 miskin dari data yang ada, atau sekitar 34.2%. Ini yang wajib hukumnya dan harus didahulukan.

Kemudian, BAZNAS juga berpikir bahwa kita harus membantu pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kalau untuk fakir dan miskin ini kan hanya untuk makan saja. Tapi ada namanya usaha ekonomi produktif. Sehingga ini salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi orang miskin. Di Kabupaten Barru itu ada 4 kelompok yang mengelola ekonomi produktif, dan kami memberikan bantuan berupa pembelian sapi, yang kemudian dipelihara oleh mustahik.

BAZNAS Kabupaten Barru bisa seperti sekarang, tahun 2021 bisa mengumpulkan zakat sampai dengan 21 miliar rupiah, karena kami diukung pemerintah. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan terhadap ASN untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS. Sehingga BAZNAS berkomitmen harus

membantu pemerintah daerah, apabila suatu saat pemerintah butuh bantuan. Seperti kalau ada bencana alam.

Kemudian, terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap kami. Bukan hanya kepada BAZNAS, tapi kepada semua komponen yang terlibat. Seandainya masyarakat tidak percaya, pasti mereka berpikir ketika ingin mengeluarkan zakatnya. Tapi mereka ini justru memberikan zakatnya dengan senang hati.

Berikutnya, terkait dengan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tumbuh, karena adanya kepercayaan kepada kita. Sedangkan kepercayaan ini timbul karena adanya keterbukaan pengelolaan. Jadi kewajiban BAZNAS itu diantaranya melaporkan kepada Pak Bupati dan Kemenag sebanyak 1 kali dalam 6 bulan. Tapi ada satu hal yang paling mendasar bagi kita, namun sudah 2 tahun terakhir ini tidak dilakukan, yaitu pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Di sinilah kita hadirkan seluruh mustahik atau penerima dan menyatakan bahwa di kecamatan ini, sekian zakatnya yang masuk dan kita sudah menyerahkannya kepada sekian fakir dan sekian miskin. Sehingga masyarakat tahu persis bahwa BAZNAS itu betul-betul melakukan pelaporan secara terbuka.

Program Air Minum dan Sanitasi Membantu BAZNAS Mendistribusikan Zakat

Saya ingin menekankan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa BAZNAS itu harus berjalan bersama dengan pemerintah. Tidak boleh BAZNAS berjalan sendiri. Meskipun BAZNAS itu merupakan lembaga yang mandiri, tapi mandiri di sini diartikan sebagai tidak ada yang bisa mengintervensi BAZNAS.

Tujuan keberadaan BAZNAS ini di antaranya ialah untuk menolong, menyelamatkan dan membantu umat Islam yang ada di Kabupaten Barru. Di dalam BAZNAS, ada 3 unsur, yaitu Muzakki atau pihak yang membayar zakat, lalu ada mustahik, yaitu pihak yang berhak menerima zakat, dan ada Amil, yaitu pihak yang berhak mendiskusikan zakat itu.

Ketiga unsur ini ingin dibantu dan diselamatkan. Karena kapan Muzakki itu tidak melaksanakan haknya, yaitu membayar zakat, maka itu akan ada konsekuensinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau konsekuensi dunianya, itu seakan-akan dia menyembunyikan hak orang lain. Karena pada hakikatnya, ada

harta atau hak orang lain di dalam harta kita. Sehingga BAZNAS ini hadir untuk menolong dan membantu mereka, agar mereka tetap dapat menjalankan kewajibannya.

Kedua, yaitu menolong Mustahik. Agar kita dapat mengurangi orang yang miskin, melalui bantuan yang diberikan. Dan yang ketiga, menolong Amil. Inilah yang berhak untuk menerima dan mengeluarkan zakat yang telah diterima, serta mengatur mekanisme dalam pembagian zakat.

Untuk pengelolaan zakat di BAZNAS ini, saya meminjam apa yang dipakai oleh Bappeda. Yang mengatakan bahwa tulislah pekerjaan Anda, dan kerjakanlah apa yang Anda tulis. Serta dokumentasikan apa yang Anda kerjakan. Seperti itulah pola kerja di BAZNAS. Sekarang, ada yang namanya program kerja lima tahun. Ini berisi mengenai apa yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Yang kedua, ialah program apa saja yang ingin dicapai di setiap tahunnya. Mulai dari Januari hingga Desember. Dari situlah kemudian dijabarkan pelaksanaannya. Itu mekanisme kerja di BAZNAS.

Kemudian, saya sangat bersyukur sekali karena pemerintah mau membantu BAZNAS untuk mendistribusikan uang yang dikumpulkan, melalui program air minum dan sanitasi. Karena dalam BAZNAS, tidak boleh ada uang yang tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga, saya berharap agar apa yang kita programkan sekarang, yaitu terkait dengan sanitasi dan air minum, dapat terus berjalan.



H. Amrullah Mamma

Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Barru

BAGIAN KEDUA

TATA LAKSANA PELAKSANAAN KOLABORASI PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI

PERJANJIAN KERJA SAMA BAZNAS DAN POKJA PKP

Draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) akhirnya disetujui untuk disahkan. Pengesahan dilakukan dengan penandatanganan bersama antara Pokja AMPL dengan BAZNAS Kabupaten Barru. Penandatanganan dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Mei 2019. BAZNAS Kabupaten Barru diwakili oleh Ketua BAZNAS *Anre Gurutta* Prof. Dr. H.M Faried Wadjedy, MA. Sedangkan Pokja AMPL (saat itu) diwakili Ketua Pokja Dr. Ir. Abustan, M.Si.

Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan agar keluarga miskin mempunyai sarana air minum perpipaan dan jamban dengan tangki septik, agar terhindar dari penularan penyakit, sehingga mengganggu produktifitas kesehatan keluarga sehingga berakibat menurunnya pendapatan ekonomi. Sedangkan tujuan perjanjian kerja sama adalah agar keluarga miskin yang belum memiliki sarana air minum perpipaan dan jamban dengan tangki septik, dapat diberikan bantuan pembangunannya. Dengan demikian keluarga tersebut dapat terbebas dari penyakit berbasis

lingkungan, sehingga sehat secara jasmani, rohani dan ekonomi.

Perjanjian kerja sama juga memuat hal yang sangat penting, sebagai implementasi kerja sama yang dimuat dalam ruang lingkup kerja sama. Di sana disebutkan, Pihak Kedua (Pokja AMPL) wajib memberikan data calon keluarga penerima bantuan pembangunan sarana air minum perpipaan (data nama KK dan alamat) kepada Pihak Pertama (BAZNAS), dimana BAZNAS akan melakukan verifikasi kelayakan terlebih dahulu. Disebutkan pula bahwa BAZNAS akan memfasilitasi Pokja AMPL, dalam pemberian bantuan pembangunan sarana air minum perpipaan dan atau jamban dengan tangki septik setelah melalui verifikasi kelayakan oleh BAZNAS.

Di sana juga disebutkan, Pokja wajib melakukan pemecuan dan promosi perilaku *hygiene*, dan membuat rencana tindak lanjut bersama calon keluarga yang menerima bantuan pembangunan sarana air minum perpipaan dan atau sarana jamban dengan tangki septik, serta laporan hasil kegiatan kepada BAZNAS sehingga dapat dilakukan evaluasi kedua pihak.

Terjadinya momentum penting itu, secara prinsip, adalah pertemuan kesamaan visi dan misi serta maksud dan tujuan. Hal-hal itulah yang menjadi cikal bakal dari penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut.

Terkait waktu perjanjian, pelaksanaan kerja sama tersebut disepakati selama lima tahun, yakni sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Terkait masa berlakunya perjanjian kerja sama selama lima tahun dalam pandangan Wakil Ketua II BAZNAS, Drs H La Minu Kalibu, M.Si, hal itu akan memudahkan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping itu, masa waktu perjanjian itu menyesuaikan dengan masa jabatan para pengurus BAZNAS. Jadi dengan masa berlaku perjanjian kerja sama yang waktunya sama dengan masa bakti para pengurus BAZNAS, BAZNAS dan pokja bisa bekerja sama secara optimal dan mencapai tujuan yang optimal pula.

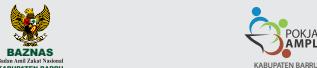
Pola kerja kolaborasi BAZNAS dan Pokja AMPL di Kabupaten Barru dalam mendukung pembangunan air minum dan sanitasi, sejalan dan selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Nomor 001/MUNAS IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.

Penjelasan fatwa tersebut adalah, pendayagunaan dana ZIS untuk sarana air minum dan sanitasi layak dan aman adalah boleh sepanjang untuk

kemaslahatan umum. Kemudian lembaga amil zakat dalam proses distribusi zakatnya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat muslim yang membutuhkan.

Kerja sama Pokja AMPL/PKP dan BAZNAS



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 001/POKJA-AMPL-KAB/BR/V/2019

Tentang Bantuan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Dasar Bagi Keluarga Miskin



MAKSUD DAN TUJUAN



Masyarakat miskin dapat terhindar dari penyakit yang dapat mengganggu aktivitasnya.



Masyarakat miskin mendapat bantuan pembangunan sarana air minum dan sanitasi.

RUANG LINGKUP KERJASAMA



Pokja PKP memberikan data calon penerima bantuan dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh BAZNAS Kab. Barru.



BAZNAS Kab. Barru memberikan bantuan setelah verifikasi kelayakan.



Pokja PKP melakukan promosi perilaku higienis kepada penerima bantuan dan memberikan laporan ke BAZNAS Kab. Barru.

Lalu bagaimana kerja sama itu dilaksanakan?

Sebagaimana kesepakatan dalam kerja sama, data yang telah diolah Pokja AMPL disampaikan kepada BAZNAS. BAZNAS kemudian melakukan verifikasi kelayakan data tersebut. Proses verifikasi terutama dilakukan untuk memastikan apakah calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria asnaf. Verifikasi ini menjadi ranah dan otoritas BAZNAS sehingga Pokja tidak ikut mencampuri hal itu.

Setelah muncul hasil verifikasi, Pokja melalui Dinas Kesehatan bertugas melakukan promosi perilaku higienis kepada penerima bantuan. Jadi bantuan yang diberikan tidak hanya berupa pembangunan sarana, namun juga kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. Calon penerima bantuan harus benar-benar mau memanfaatkan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi yang diberikan.

Dalam pelaksanaan kerja sama, BAZNAS mengeluarkan dana sesuai dengan pengajuan permohonan bantuan yang diusulkan pokja. Jumlah dana yang akan

dikeluarkan BAZNAS senilai 1,8 juta rupiah per unit atau per keluarga. BAZNAS kemudian melakukan verifikasi yang dilakukan oleh relawan Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Relawan LAB ada di semua desa di Kabupaten Barru, sehingga proses verifikasi tidak membutuhkan waktu lama.

Pengajuan biaya sebesar 1,8 juta rupiah oleh pokja dimaksudkan agar sarana sanitasi yang dibangun sudah mengarah ke level sanitasi aman. Jadi selain kloset jongkok, bangunan bawahnya berupa tangki septik yang sudah kedap. Untuk bangunan dinding dan atap menjadi kontribusi warga, selain kontribusi *in kind* berupa tenaga untuk membangun sarana tersebut. Besarnya kontribusi warga bervariasi, jumlahnya ratusan ribu hingga jutaan. Misalnya saja untuk warga di Kelurahan Palanro dan Sumpang Binangae berkisar 250 ribu rupiah – 300 ribu rupiah. Namun ada satu warga di Kelurahan Takkalasi, jumlah kontribusinya mencapai 2 juta rupiah – 3 juta rupiah.

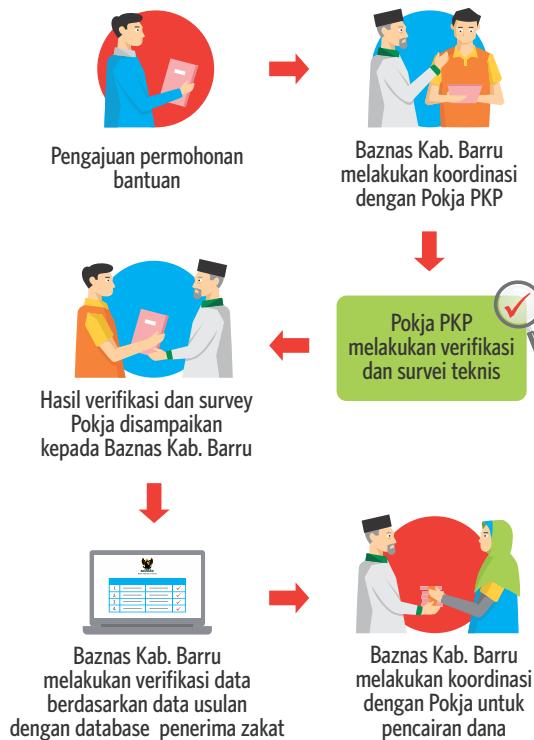
POKJA PKP maupun BAZNAS tidak mensyaratkan dan menentukan jumlah kontribusi. Nilai kontribusi berdasarkan keinginan dan kebutuhan serta

kemampuan warga. Bahkan Pokja memberikan saran untuk warga tidak mampu, agar memanfaatkan atap atau seng bekas untuk menjadi atap sarana sanitasi yang dibangun.

Pengajuan ini dimaksudkan agar pemerintah tidak perlu bekerja dua kali untuk mencapai target sanitasi aman. Sehingga data yang diberikan ke BAZNAS adalah data warga yang saat ini

Mekanisme Kerjasama BAZNAS dan Pokja PKP dalam Penyaluran Bantuan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Barru

MEKANISME 1



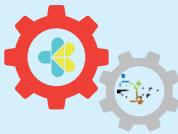
MEKANISME 2



kondisi sarana sanitasinya benar-benar tidak layak. Dari kondisi tidak layak langsung menuju ke sanitasi aman. Sedangkan dinding dan atap dimintakan swadaya dari warga yang dibantu. Menurut Syamsubaird, dalam skema bantuan yang diberikan oleh BAZNAS, BAZNAS meminta adanya pola kolaborasi para pihak seperti dengan pokja,

warga atau pihak lainnya. Jadi dalam praktiknya, seluruh proses pembangunan tidak seluruhnya ditanggung BAZNAS. Pola kolaborasi ini memicu peran serta masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari adanya keterlibatan tokoh masyarakat yang ikut membantu proses pembangunan sarana air minum dan sanitasi tersebut.

Pembagian Peran dalam Implementasi Kolaborasi



- Menyediakan data warga yang belum memiliki sarana air minum dan sanitasi.
- Menyampaikan data warga kepada BAZNAS.
- Dinas Kesehatan (Sanitarian) melakukan pemecuan kepada calon penerima bantuan.
- Dinas Kesehatan (Sanitarian) melakukan verifikasi data setiap calon penerima bantuan.
- Dinas Kesehatan (Sanitarian) melakukan pemantauan kondisi sanitasi di masyarakat.
- Dinas Kesehatan (Sanitarian) mendukung penggunaan dan pemeliharaan sarana.



- Melakukan verifikasi data yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
- Menentukan pemberian bantuan kepada mustahik yang memenuhi syarat
- Menyalurkan bantuan kepada warga yang telah memenuhi syarat



- Kepala desa/lurah memvalidasi data warga dengan data yang ada di desa/kelurahan.
- Memastikan warga calon penerima bantuan untuk memanfaatkan sarana yang akan dibantu.
- Pemerintah desa/kelurahan menjadi penanggung jawab pelaksanaan pembangunan sarana di wilayahnya.
- Warga mengerjakan pembangunan sarana (WC) dari bantuan Baznas.
- Menyediakan dana swadaya tambahan untuk kelengkapan sarana.

“Polanya itu selalu kerja sama, masyarakat juga didorong terlibat. Jadi setelah BAZNAS sediakan lantai dan rangka dindingnya serta toilet dan septik tanknya. Warga gotong royong membuat dinding dan atap. Terserah bahan dindingnya dan atapnya, apakah seng atau bahan lainnya yang ada, pokoknya mereka harus pasang dinding dan atap,” ujar Syamsubaird.

Lalu apa saja pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang sudah dibangun selama masa kerja sama dari tahun 2019 itu?

Sejak perjanjian kerja sama ditandatangani pada tahun 2019, sampai akhir tahun 2021 sejumlah pembangunan sarana air minum dan sanitasi telah dilakukan. Pembangunan dimulai pada tahun 2019 atau tak lama setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan. Di tahun 2019 itu, BAZNAS memberikan bantuan enam unit untuk warga Desa Tompo. Pada tahun berikutnya atau 2020 BAZNAS secara massif memberikan bantuan dengan membangun 126 jamban untuk 126 keluarga senilai 226,8 juta rupiah.

“Total dana BAZNAS yang tersalurkan untuk pembangunan air minum dan sanitasi, sejak bekerja sama dengan pokja mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 1,250 miliar rupiah. Itu termasuk di dalamnya sarana sanitasi dalam program bedah rumah, sebagai program BAZNAS,” jelas Wakil Ketua II BAZNAS, Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si.

Selain sarana sanitasi, lanjut Syamsubaird di tahun 2020 itu BAZNAS juga membangun sarana air minum senilai 20 juta rupiah di Dusun Parenring. La Minu menambahkan, BAZNAS juga menyuplai kebutuhan air minum 50 keluarga di Pulau Panikian. Di pulau itu tidak ada air bersih, jadi BAZNAS membangun tandon lalu air minum disuplai ke pulau tersebut, sehingga kebutuhan air minum warga di sana terpenuhi. Kemudian di tahun 2021, BAZNAS melanjutkan dengan membangun lima jamban di Desa Binangae dan 42 unit di desa lainnya.

TARGET PEMBANGUNAN MBR	TERBANGUN			SISA YANG AKAN DITANGANI
	2019	2020	2021	
6.811 KK	6	126	47	
TOTAL	6	126	47	6.632

Jumlah pembangunan sarana sanitasi hasil kerja sama Pokja PKP dengan BAZNAS Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di atas.

Jumlah dana BAZNAS yang telah disalurkan untuk pembangunan sarana sanitasi selama program kerja sama tahun 2019-2021 mencapai 322,2 juta rupiah. Sementara sisa rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum mendapatkan bantuan yakni sebanyak 6.632 KK, akan ditangani dalam lanjutan kerja sama dengan BAZNAS atau tahun 2022 dan seterusnya.

Selain bekerja dengan Pokja PKP, BAZNAS Kabupaten Barru juga memiliki program yang berintegrasi dengan Pokja PKP yakni bedah rumah. Dalam program ini Pokja PKP memberikan dampingan

teknis untuk kelengkapan sarana jamban dalam program bedah rumah tersebut.

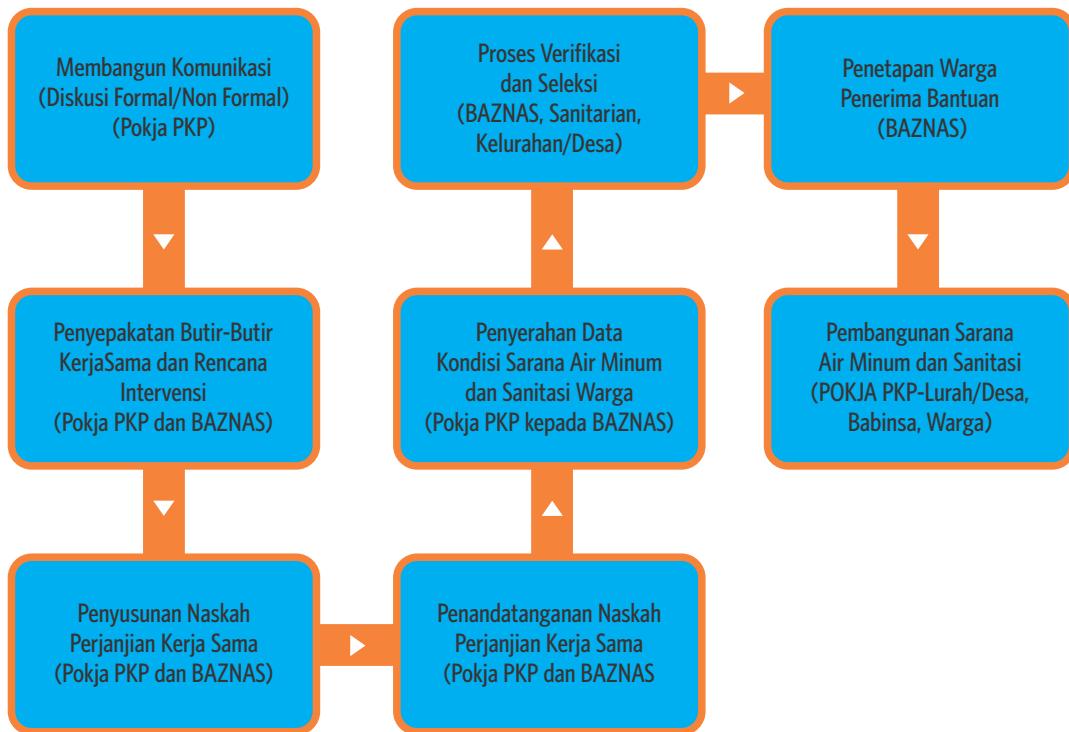
Menurut H. La Minu Kalibu, jumlah total dana program pembangunan sarana jamban dalam kerangka kerja sama dengan program PKP dan program integrasi bedah rumah, telah mencapai 1.250 miliar rupiah.

Terbangunnya sarana air minum dan sanitasi yang layak mendukung kualitas kesehatan di masyarakat. Demikian halnya yang terjadi dalam kerja sama pembangunan antara pokja dengan BAZNAS. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, selama tahun 2021 angka kejadian penyakit berbasis lingkungan menurun tajam. Misalnya saja angka kejadian diare di semua puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Kabupaten Barru turun drastis.

Menurut Syamsubaird, kondisi itu tercipta berkat kerja sama semua pihak di Kabupaten Barru dan tidak lepas dari bimbingan dan dukungan komitmen Bupati Barru. Menurutnya, Bupati Ir. H. Suardi Saleh sangat besar dukungan dan komitmennya membangun sektor air minum dan sanitasi. Bahkan dikatakan,

bupati cukup detail dan fasih berbicara kedua sektor itu di luar kepala atau pidato tanpa teks terkait air minum dan sanitasi. Demikian halnya Ketua Forum KKS, drg. Haznah Syam, MARS, yang memiliki komitmen tinggi membebaskan warga Kabupaten Barru dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Tata Laksana Kerja Sama BAZNAS dengan Pokja PKP



GANDENG BAZNAS CAPAI TARGET AIR MINUM DAN SANITASI TUNTAS

Kerja sama antara Pokja PKP (sebelumnya dikenal sebagai Pokja AMPL) dengan BAZNAS, memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pokja manfaat yang dirasakan adalah terjadinya percepatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi, melalui pendanaan dari BAZNAS. Sementara manfaat yang dirasakan BAZNAS adalah program kerja sama itu meningkatkan kualitas keberlanjutan program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam program bedah rumah, yang sudah dilaksanakan sebelum kerja sama dengan pokja, dulu proses verifikasi sarana air minum dan sanitasi tidak mengharuskan air perpipaan PDAM atau jamban dengan tangki septik. Namun setelah bekerja sama dengan pokja, BAZNAS kini mensyaratkan sarana air minum yang dibangun harus perpipaan dari PDAM dan sarana sanitasinya harus ada tangki septik yang kedap. Jika syarat keduanya tidak terpenuhi, maka BAZNAS tidak akan memberikan bantuan bedah rumah.

“Ke depan, kami dan BAZNAS akan terus bekerja sama untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sesuai aturan penggunaan zakat. Kerja sama akan terus dilakukan sampai pada pencapaian layanan air minum aman 100% dan sanitasi aman 100%,” tandas Sekda.

Oleh karena adanya manfaat besar yang dirasakan kedua belah pihak, maka keduanya sepakat bahwa kerja sama akan terus dilakukan, bahkan ketika nanti usia perjanjian kerja sama pertama berakhir di tahun 2024. Perjanjian kerja sama baru akan dibuat lagi. Hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. Ir. Abustan, M.Si.

Sekda menyatakan, setelah perjanjian kerja sama itu selesai, akan dilanjutkan dengan kerja sama berikutnya. Pihaknya akan terus bekerja sama dengan BAZNAS demi tercapainya layanan air minum dan sanitasi aman.



Foto: Tim Pokja untuk kolaborasi sanitasi Baznas.

Sekda menyatakan, pihaknya akan terus mendorong peran BAZNAS untuk melayani masyarakat. Dikatakan, BAZNAS memiliki program unggulan dan hal itu akan terus disinergikan dengan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Barru. Menurutnya, selain sektor air minum dan sanitasi, BAZNAS juga memiliki program kesehatan dan pendidikan.

Hal yang sama disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Umar, S.KM. M.Kes. Menurutnya, kerja sama

antara pokja dengan BAZNAS dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi diupayakan keberlanjutannya. Hal itu karena banyak keuntungan yang diperoleh dari kerja sama pokja dengan BAZNAS. Diantaranya, bantuan dari BAZNAS memudahkan Pemerintah Kabupaten Barru mengimplementasikan perencanaan pembangunannya, tanpa harus menunggu adanya alokasi dana dari APBD.

Dikatakan pula, pendanaan dari BAZNAS prosesnya relatif lebih sederhana dan

“Bantuan dari kerja sama dengan BAZNAS ini memudahkan kita membiayai kebutuhan riil masyarakat yang sering tidak ada nomenklatur dalam APBD. Kerja sama ini juga sangat membantu karena adanya sumber pendanaan di luar APBD. Terlebih APBD kami memang terbatas,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Umar, S.KM. M.Kes.

cukup fleksibel. Misalnya tidak harus melalui pembahasan dengan DPRD atau tahapan lainnya seperti menunggu revisi anggaran tengah tahun. Oleh karena itu, Umar menandakan, kerja sama Pokja PKP dengan BAZNAS terus diupayakan keberlanjutannya, setelah perjanjian kerja sama nanti berakhir tahun 2024. Karena BAZNAS menjadi salah satu mitra pembangunan sanitasi dan air minum bagi masyarakat.

Umar menyatakan, diharapkan kerja sama ke depan adalah kerja sama yang saling

menguntungkan dalam kolaborasi program kegiatan terkait air minum dan sanitasi serta program terkait lainnya. Misalnya saja untuk memicu dan memacu akselerasi pencapaian 5 Pilar STBM serta konvergensi *stunting*. Sasaran program itu terutama pada area delapan asnaf yang bisa dibiayai pihak BAZNAS.

Pada kesempatan yang sama, Syamsubaird menambahkan, kerja sama dengan BAZNAS harus dilanjutkan karena konsentrasi sektor sanitasi, setelah berhasil menuntaskan BABS atau telah ODF, kini dan ke depan adalah mengejar sanitasi aman. Dikatakan salah satu syarat sanitasi aman adalah dilakukan penyedotan pada tangki septik, nah oleh karena itu pihaknya telah mempersiapkan pembentukan UPTD PALD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik) yang kelak akan konsentrasi mengimplementasi kan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

Pembentukan UPTD direncanakan terlaksana tahun 2022 seiring pemindahan wewenang urusan air limbah domestik dari Dinas Perumahan dan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR). Pemerintah

Kabupaten Barru bahkan telah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) pembentukan UPTD dan SOP (*Standard Operating Procedure*) terkait penyedotan lumpur tinja serta sarana dan prasarana untuk mendukung L2T2. Pelaksanaan penyedotan tinja saat ini dilakukan oleh Seksi di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman. Pelaksanaan penyedotan berdasarkan permintaan dari warga (*on call*). Oleh karena itu, Syamsubaird berharap pembentukan UPTD PALD dan

pelaksanaan L2T2 bisa dilaksanakan di tahun 2022.

Kolaborasi BAZNAS bersama Pokja PKP ke depan menurut La Minu harus tetap dilanjutkan, terlebih bagi BAZNAS program air minum dan sanitasi harga mati. Artinya dari tahun ke tahun program itu akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan jumlah pembangunan sarananya.

“Terlebih tujuan program ini kan sama persis dengan visi misi Bapak Bupati Barru, jadi inshaallah tidak akanlah berhenti. Walaupun misalnya, Pokja PKP proses atau prosedurnya agak lama, kami yang akan mempercepatnya. Prinsipnya, kita akan terus berkolaborasi untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi,” tandas La Minu.



**CERITA DARI
LAPANGAN**

PENGALAMAN SANITARIAN DAN KADER KESEHATAN: PENDATAAN, PEMICUAN HINGGA PEMANTAUAN

“Bahkan sampai saat ini, kami juga masih sering melakukan edukasi terkait *septic tank*. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu atau sudah lupa terkait *septic tank* tersebut. Intinya, pembahasan tentang jamban itu tidak akan pernah ada habisnya,” ujar Suriani.

Keberhasilan kolaborasi BAZNAS dan Pokja PKP terletak pada implementasi di lapangan, yakni kegiatan penyediaan sarana sampai kepada para mustahik. Sebelum sarana dibangun, ada proses-proses yang dilalui, mulai dari verifikasi data calon penerima, menetapkan calon penerima dan promosi perubahan perilaku pada penerima manfaat. Proses itu adalah fase-fase penting dari proses pelaksanaan kerja sama di lapangan.

Pada setiap tahapan itu, ada pihak-pihak yang berperan penting di dalamnya. Mereka bersama warga, baik sebelum, selama dan setelah pembangunan sarana. Mereka di antaranya adalah sanitarian dan kader kesehatan. Apa yang terjadi di lapangan, baik buruknya, sukses atau gagalnya, melibatkan peran mereka. Kisah mereka di lapangan bersama warga penting disampaikan.

Proses verifikasi data calon penerima disampaikan sanitarian Puskesmas Madello, Suriani Jamaluddin. Dikatakan, pihaknya melakukan penyesuaian data dari BAZNAS dengan data yang ada di Puskesmas. Data yang dimaksud Suriani adalah masyarakat yang masih BABS. Sebelum ditentukan penerima sampai penyediaan sarana, puskesmas terus melakukan koordinasi dengan BAZNAS. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penerima sehingga tidak salah sasaran.

Menurut Suriani, penerima manfaat benar-benar dipilih dengan baik,

berdasarkan data yang ada dan melalui proses verifikasi. Calon penerima adalah warga masyarakat yang tidak memiliki jamban dan menumpang pada saat BAB. Pendataan warga dilakukan bertingkat menurut status kepemilikan dan ketersediaan jamban di rumahnya. Mulai dari masyarakat yang masih BABS, warga yang statusnya masih menumpang, juga warga yang memiliki jamban. Untuk kepemilikan jamban, masih dilihat dulu model jambannya, apakah sudah memenuhi syarat kesehatan atau belum. Proses itu terus dijalankan para sanitarian.

Di samping melakukan pendataan, sanitarian juga melakukan monitoring kondisi jamban maupun perilaku masyarakat. Hal itu disampaikan Arhama Aziz, sanitarian puskesmas Mangkoso. Menurutnya, apabila data di suatu wilayah telah tersedia, maka sanitarian memonitoring perilaku warga, khususnya apakah masih BABS atau tidak. Kegiatan monitoring itu juga merupakan salah satu program puskesmas, yaitu monitoring STBM.

Selama proses bantuan penyediaan jamban dari BAZNAS, Arhama Aziz

mengatakan, dia hampir setiap hari mengunjungi warga yang akan menerima bantuan. Selain melakukan monitoring juga memberikan edukasi atau promosi perubahan perilaku. Pada wilayah kerjanya, dia membantu mengimplementasikan bantuan BAZNAS untuk 72 KK. Arhama ikut senang, kini warga yang dulu BABS sudah memiliki jamban sendiri akses air minum dari PDAM juga telah tersedia.

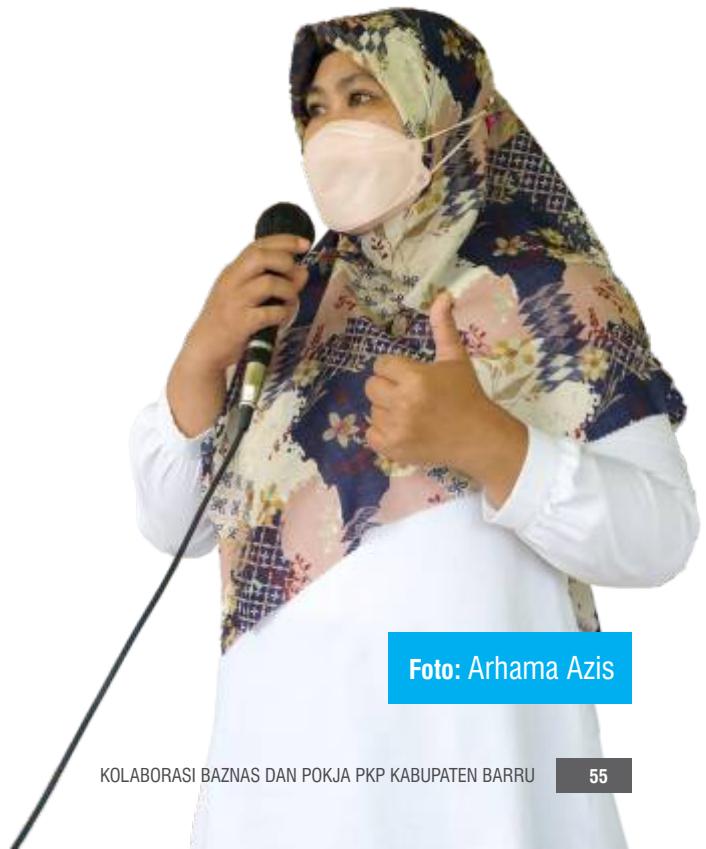


Foto: Arhama Aziz

“Oleh karena itu, kami tidak lupa berterima kasih sekali kepada para kader, karena mereka menjadi ujung tombak dari data yang kami peroleh,” ujar Ardianti.

Ardianti, Sanitarian puskesmas Padongko mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kerja di lapangan, seperti pendataan, memerlukan komitmen, kerjasama dan kolaborasi. Kerja sama dimulai dari tingkat kader, sanitarian hingga ke dinas atau level pemerintah kabupaten. Dikatakan, untuk pendataan *by name by address* STBM, Sanitarian mendapatkan data tersebut dari kader. Ardianti yang pernah melakukan pendataan *door to door* menggunakan aplikasi itu paham seluk beluk dan susah senang pendataan.

Terkait program bantuan jamban dari BAZNAS, Ardianti mengungkapkan warga sangat bersyukur, karena hal tersebut menjadi awal adanya perubahan perilaku bagi mereka. Terlebih karena ada beberapa warga yang tidak mendapatkan, karena masalah lahan. Warga yang tidak mendapatkan bantuan karena tinggal di

lahan orang lain, atau mereka menumpang dan belum mendapat izin untuk membangun WC di lahan tersebut. Meskipun jika dilihat dari data yang ada, mereka memang berhak mendapatkan bantuan.

Demi perbaikan pelaksanaan bantuan penyediaan sarana jamban, Ardianti memberikan masukan agar kerja sama dan komunikasi lintas sektor ditingkatkan.

Tugas dan kegiatan Sanitarian mungkin sama di semua kabupaten/kota. Tugas itu meliputi pemicuan, pendataan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Namun ada yang berbeda dengan pola kerja dan koordinasi di Kabupaten Barru. Kegiatan sanitarian puskesmas tidak berhenti di puskesmas saja, namun hasilnya dilaporkan kepada dinas kesehatan. Laporan dapat berupa permasalahan yang ada di lapangan, atau terkait dengan data-data. Laporan itu oleh dinas kesehatan dikoordinasikan kepada Pokja PKP.

Setelah dibahas, Ketua Pokja PKP memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan terkait langkah yang harus dilakukan mengatasi persoalan yang dilaporkan. Kemudian dinas kesehatan

“Lalu nanti akan ada rapat koordinasi yang dilakukan, yang membahas permasalahan-permasalahan sanitasi dan air bersih yang terjadi di masyarakat. Itulah yang berbeda di sini dengan di tempat lain,” kata Heryani Syamsu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.

menyampaikan kepada sanitarian atau Tim Monev. Pola kerja sama dan koordinasi di Pokja PKP, menurut Heryani, yang membuat program kerja sama dengan BAZNAS berhasil. Menurutnya, koordinasi yang kuat di Pokja PKP menjadi kunci keberhasilan program di Kabupaten Barru.

Sri Wahyuni, Kader Kesehatan dan anggota Tim Pemantauan di masyarakat, menguraikan pengalamannya. Dikatakan, Tim Pemantauan atau Tim Monev adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah setempat, untuk melakukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi terkait kondisi air minum dan sanitasi warga.

Sri mengaku tergerak melihat keadaan sanitasi dan air minum di sekitar lingkungannya. Tempat tinggalnya berada di pinggir laut, kebiasaan masyarakat melakukan BAB di pantai sudah menjadi hal yang wajar. Kondisi itu yang membuatnya risih, karena jika ada tamu dari luar, persoalan BABS warga di pantai selalu dibahas. Kami. Sri berpikir bagaimana caranya agar bisa mengubah kebiasaan masyarakat, dan bagaimana pula cara agar bisa membantu masyarakat memperoleh bantuan jamban.

“Kami melakukan kunjungan *door to door* ke masyarakat. Kami menanyakan apa kendala mereka atau apa yang menyebabkan mereka melakukan BABS,” ujar Sri.

Sri lalu mulai memberikan arahan kepada warga dan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak seperti puskesmas, sanitarian dan kelurahan untuk mengusulkan bantuan bagi warganya. Sebagai warga biasa, Sri awalnya kurang percaya diri mendampingi warganya. Kebetulan, tak lama kemudian ada pelatihan dari program IUWASH PLUS. Dia dilatih melakukan pendataan, monitoring dan

melakukan promosi kepada masyarakat. Setelah pelatihan, kemampuannya meningkat dan memiliki akses pelaporan ke pemerintah. Pendataan yang dilakukan Sri dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan *Tudang Sipulung*.

“Setelah itu, ada titik balik dari kegiatan kami, mulai dengan dari adanya bantuan dari BAZNAS, bantuan dari PDAM, dan bantuan dari DPKP,” cerita Sri.

Terkait bantuan dari BAZNAS, Kelurahan Mangkoso di mana Sri tinggal, menurutnya mendapat bantuan paling banyak, sekitar 72 kepala keluarga. Fasilitas sanitasi di wilayah itu sebelumnya sangat minim. Hal karena mayoritas warganya tinggal menumpang di lokasi milik salah satu tokoh masyarakat. Faktor kedua adalah faktor ekonomi, mereka mayoritas miskin dan belum memprioritaskan kebutuhan sanitasinya.

Sri mengatakan senang melihat bantuan yang diberikan BAZNAS tidak berupa uang, tapi material bangunan, seperti batu bata, semen, pipa, sehingga masyarakat sendiri yang

membangunnya. Hal itu membangkitkan sikap swadaya dan gotong royong warga. Pembangunan jamban dilakukan secara gotong royong, tidak saja antar warga, namun lurah dan Babinsa juga ikut membantu. Model gotong royong itu dilakukan untuk semua sarana bagi warga yang dibantu. Jadi setelah selesai pembangunan jamban di salah satu rumah, mereka pindah ke rumah yang lainnya dan begitu seterusnya.



Foto: Sri Wahyuni

Oleh karena itu, Sri mengatakan warga di Mangkoso sangat terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS. Warga kini sudah bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya.

“Sehingga dari situlah kebiasaan masyarakat berangsur-angsur berubah dan Alhamdulillah kita kini bisa melihat perubahan besar yang terjadi di

lingkungan mereka, yaitu tidak ada lagi masyarakat yang melakukan BABS di pantai,” ujar Sri, senang.

Agar sarana yang dibangun bisa bermanfaat secara berkelanjutan, Sri berharap ada sosialisasi pemeliharaan terkait dengan cara merawat tangki septik milik warga.



Foto: Bantuan Sarpras Air Minum dari BAZNAS dan Pokja

SUARA GEMBIRA WARGA PENERIMA

Program kolaborasi BAZNAS dan Pokja PKP Kabupaten Barru ditujukan kepada mustahik (penerima zakat) yang telah memenuhi syarat. Warga yang menerima telah memenuhi syarat, baik dari syarat teknis dan kesehatan, maupun syarat syar'i (aturan dalam hukum Islam) yang telah ditetapkan BAZNAS.

Apa perbedaan kondisi sarana air minum dan sanitasi mereka sebelum dan setelah menerima bantuan? Adakah perubahan atau peningkatan yang terjadi?

Berikut ini adalah suara kegembiraan mereka, warga penerima manfaat dari program kerjasama ini.

Norma

Kami Tak Lagi BAB di Sungai

Norma, warga Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru mengatakan, dia menerima bantuan pembangunan jamban tahun 2019. Menurut ceritanya, proses yang dijalani pada saat pembangunan jamban cukup berat. Terutama kesulitan pada waktu proses penggalian tanah. Namun dia dan warga penerima bantuannya lainnya didukung penuh Pak Lurah dan aparat kelurahan lainnya. Norma mengaku senang, karena

masing-masing rumah diberikan bantuan jamban, sehingga tidak ada tetangga yang menumpang ketika ingin buang air.

Bantuan itu sangat membantu dan mengubah perilaku buang air besar keluarganya. Pasalnya, sebelum mendapatkan bantuan, keluarganya buang air besar di sungai. Hal itu dilakukan terpaksa, karena tak memiliki jamban. Dia juga merasa kurang nyaman

dan risih saat buang air di sungai, karena ada warga yang juga melakukan hal yang sama.

“Alhamdulillah, kami merasa sangat senang sudah bisa buang air dengan aman dan nyaman serta tidak ada lagi gangguan. Tidak seperti dulu sebelum ada bantuan, kami serba salah, selalu merasa was-was, tidak tenang dan kurang nyaman ketika harus buang air di sungai. Belum lagi karena orang lain

juga datang untuk buang air dan mereka jalan saja melewati dan melihat kami buang air.

Norma mengaku pihaknya mengeluarkan sejumlah dana sebagai bentuk kontribusi warga penerima bantuan. Jumlah dana yang dikeluarkan keluarganya sekitar 250 ribu rupiah.

“Alhamdulillah persediaan air kami juga di sini sudah ada dan ini juga tidak lepas dari bantuan pemerintah dan BAZNAS. Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari pemerintah dan BAZNAS sebagai bentuk perhatiannya kepada kami masyarakat yang kurang mampu,” ujar Norma.



Suharti

Dulu Menumpang BAB di Jamban Tetangga

Senada dengan Norma, kegembiraan dan rasa syukur juga diungkapkan Suharti, warga Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu. Sama seperti Norma, Suharti dan keluarga juga menerima bantuan pembangunan fasilitas jamban di rumahnya sekitar tahun 2019-2020. Sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan BAZNAS, Suharti dan keluarga harus menumpang di tetangganya jika akan membuang hajat.

“Saya dan keluarga baru menggunakan jamban ini ketika sudah jadi. Selama proses menunggu hingga jadi, untuk BAB kami masih menumpang tetangga. Kira-kira sekitar akhir 2021 baru kami menggunakan fasilitas jamban ini,” ujarnya.

Diceritakan, untuk mendapatkan bantuan, dia tidak ditunjuk langsung, namun menyerahkan data sebagai warga yang belum memiliki jamban. Lalu data tersebut diverifikasi oleh BAZNAS. Setelah terverifikasi, barulah dia ditetapkan menjadi salah satu warga yang mendapatkan bantuan.



Warga di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Sukriati, semula juga menumpang di jamban tetangga untuk membuang hajatnya. Setelah mendapatkan bantuan BAZNAS di tahun 2020, barulah ia dan keluarga nyaman jika membuang hajat karena sudah di jamban milik sendiri. Sukriati menjadikan bantuan dari BAZNAS sebagai stimulan, sebab ia berswadaya menambah biaya pembangunan jamban di rumahnya.

“Untuk bantuan pembangunan jamban kami mendapatkan bantuan batu bata dan semen untuk membuat dasarnya. Namun karena kami ingin membangunnya di rumah bagian atas, jadi kami menambah bahan materialnya sendiri. Alhamdulillah sekarang setelah menerima bantuan keadaan jadi lebih enak. Saya dan keluarga ingin buang air itu nyaman apalagi jambannya sekarang di atas rumah, jadi ketika sakit pun tidak masalah. Dulu sebelum ada bantuan fasilitas jamban yang kami terima, kami harus pergi ke rumah saudara untuk menumpang buang air,”kata Sukriati.

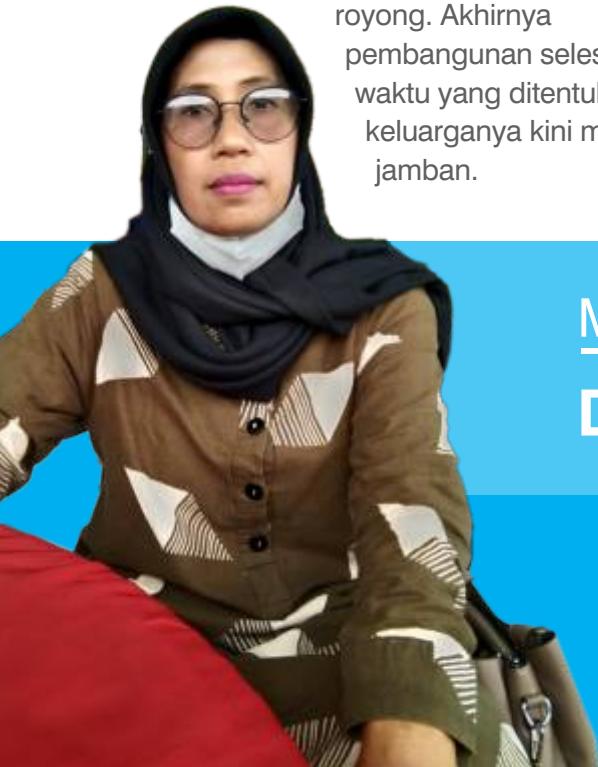


Sukriati **Sekarang Nyaman Kalau BAB**

Marlina, warga Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja menceritakan proses pembangunan bantuan jamban yang diterimanya. Setelah keluarganya terpilih menjadi penerima bantuan, oleh tim dari BAZNAS pembangunannya ditarget harus selesai dalam waktu 2 minggu. Untuk memenuhi target waktu, keluarga dan para tetangga saling

membantu dan bergotong royong. Akhirnya pembangunan selesai dalam waktu yang ditentukan dan keluarganya kini memiliki jamban.

“Kami sangat bersyukur mendapat bantuan ini. Karena sebenarnya, kami pernah berpikir untuk membangun jamban. Tapi karena kondisi ekonomi yang kadang ada dan kadang tidak, dan ada yang lebih mendesak, maka itu yang membuat kami belum bisa membangun jamban. Karena tidak enak jika harus menumpang di tetangga, kami kalau BAB di laut. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah di jamban sendiri,”ujarnya.



Marlina

Dulu Kami BAB di Laut

**KOLABORASI BAZNAS DAN
POKJA PKP KABUPATEN
BARRU DALAM
PENYEDIAAN SARANA AIR
MINUM DAN SANITASI**